

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

RUTH STEPHANY SANTOSO

NIM. 145030100111092

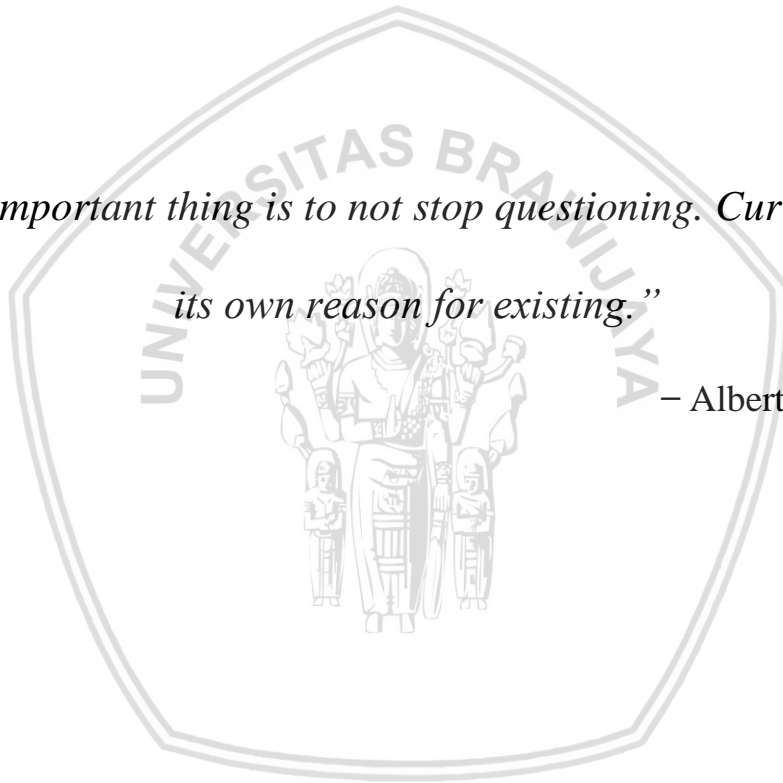


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

*“The important thing is to not stop questioning. Curiosity has
its own reason for existing.”*

– Albert Einstein



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan
Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Ruth Stephany Santoso

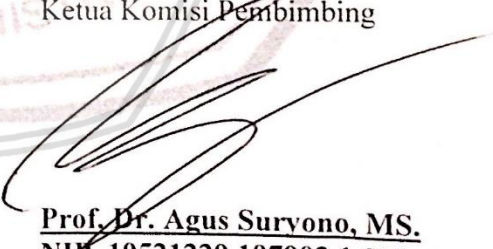
NIM : 145030100111092

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 18 Mei 2018
Ketua Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Agus Suryono, MS.
NIP. 19521229 197903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

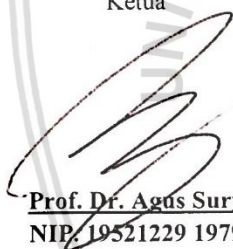
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juli 2018
Waktu : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Ruth Stephany Santoso
Judul : Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

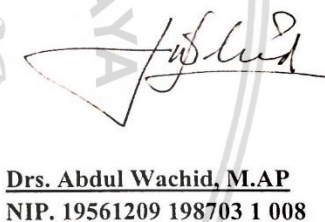
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS.
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Dr. rer. pol. Romv Hermawan, S.Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 18 Mei 2018



Ruth Stephany Santoso
NIM. 145030100111092



KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
UNTUK AYAHANDA AGUS SANTOSO
DAN IBUNDA MARIA LISBET D. SIMANJUNTAK,
UNTUK ADIKKU SARAH OLIVIA SANTOSO
SERTA ALMAMATER FIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Santoso, Ruth Stephany 2018. **Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)**. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Kebijakan publik sangatlah berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanyalah menjadi sebuah wacana dan tidak menjadi manfaat. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang di dalamnya terdapat implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa, yang terkait dengan isi kebijakan dan konteks implementasi serta dampak yang terlihat dan dampak yang tak terlihat, yang diberikan oleh program Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Dana Desa. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif model Miles, Huberman, dan Saldana dengan melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pelaksanaan program Dana Desa yang ada di Desa Pujon Kidul ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program Dana Desa, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut yaitu 1) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu dan 2) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa. Saran yang dapat peneliti berikan antara lain: 1) Perlunya penambahan banner mengenai penggunaan Dana Desa di setiap dusun Desa Pujon Kidul; serta 2) Pemerintah Pusat perlu mempercepat pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebelum memasuki bulan-bulan di mana desa sudah harus menyerahkan laporan perencanaan pembangunannya.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Desa, Program Dana Desa

SUMMARY

Santoso, Ruth Stephany 2018. **Implementation of The Dana Desa Program in Rural Development (Studies in Pujon Kidul Village, Malang District)**. Advisor: Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Public policy is strongly related to the public policy implementation. Without the implementation of policy, a policy which has been formulated would just be a discourse and won't give any benefit. Implementation of policy is an action of policy by the administrator to achieve the goals or objectives of the policy itself. This research aims to find, describe, and analyze the implementation of the Dana Desa program in rural development at Pujon Kidul Village, Malang District using policy implementation model by Merilee S. Grindle.

This research is a descriptive research with qualitative approach and using research focus by Merilee S. Grindle theory in which there is implementation of the Dana Desa program in rural development, related to the content of policy and context of implementation, also the visible and invisible effects which provided by the Dana Desa program towards rural development in Pujon Kidul Village, and also supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the Dana Desa program. Research data obtained through observation, interview, and documentation in the field. The model of data analysis that is used in this research is the model of descriptive data analysis by Miles, Huberman, and Saldana, through by data condensation process, data presentation, and conclusion or verification.

The implementation of the Dana Desa program in Pujon Kidul Village has been running well under the goal of the Dana Desa program, but there are still some obstacles. The obstacles are 1) Provision of guidelines for the implementation of technical (legal basis) the Dana Desa from the Central Government to the village that is not on time and 2) Still there are some people who have not responding the implementation of the Dana Desa program well. Suggestions that researcher can provide include is: 1) The need to adding more banners about the use of Dana Desa at every hamlets in Pujon Kidul Village; and 2) The Central Government needs to accelerate the provision of technical implementation guidelines (legal basis) on the Dana Desa to the Village Government, before entering the months in which the village has to submit its development planning report.

Keywords: Implementation, Rural Development, The Dana Desa Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Fadillah Amin, Dr, M.AP, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS, selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, Agus Santoso dan Maria Demak L. Simanjuntak, serta adik saya Sarah Olivia Santoso yang telah memanjatkan doanya kepada Sang Khalik untuk kelulusan saya, serta dukungan dan bantuannya selama peneliti menyusun skripsi ini.

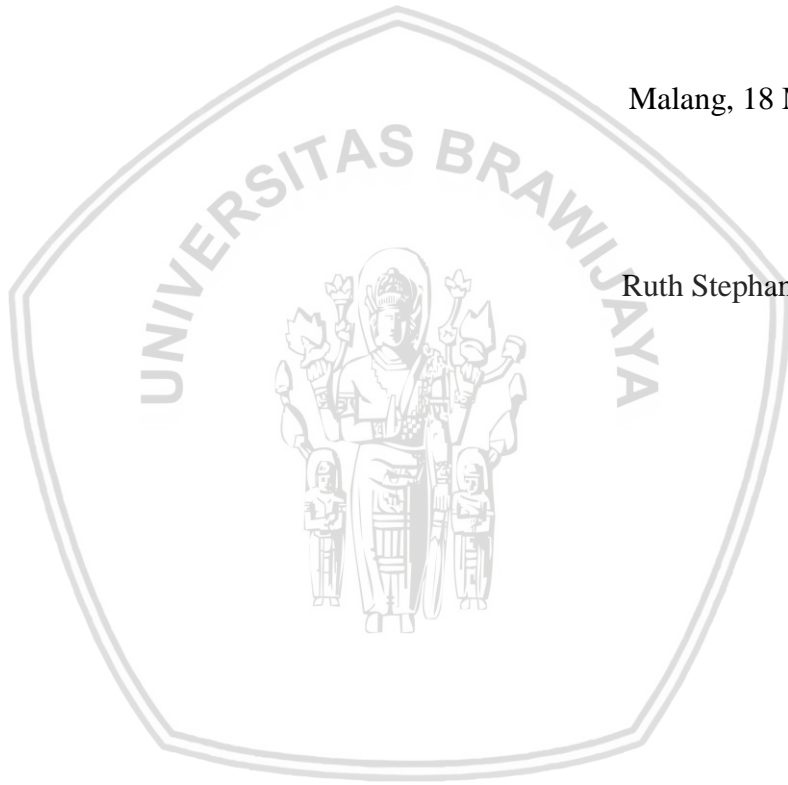
6. Seluruh pegawai Kantor Kepala Desa dan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan data yang dibutuhkan dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
7. Sahabat baru penulis di Malang, Mutia Rizki yang selalu mendukung dan menolong saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak untuk segala *sharing*, canda tawa, dan bantuannya selama ini dalam menghadapi *stress* dan *anxiety* yang penulis hadapi, serta bantuannya selama penelitian maupun hal-hal kecil lainnya, salah satunya kesehatan penulis. Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
8. Muhammad Dimas Aditya, teman yang selalu sedia untuk penulis melalui jarak jauh, mendengarkan keluh kesah penulis dalam menghadapi *stress* dan *anxiety* serta selalu menyemangati penulis. Terima kasih atas segala dukungannya dan bantuannya. Tetap semangat menjalani hidup! Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
9. Teman-teman yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Indah Sampurna, Mohammad Hilmi, Septyan Eka Buchari, Dyah Retno Ayu Setyastutik, dan Juan Kristoven Mangeto. Terima kasih atas segala bantuannya dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
10. Sahabat DARKSIDE ku, Azar Widadsyah dan Krisna Dirgantara yang selalu mendukung penulis dan membantu penulis ketika dibutuhkan. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!

11. Teman-teman Remaja Masjid Tolak Kemaksiatan 89, Muhammad Dimas Aditya, Ananda Prakoso, Muhammad Rizki Ali Akbar, Rahmat Avianto, Dhanny Subagja, dan Syarifa Mawarda yang selalu mendukung dan menghibur penulis walaupun dari jarak jauh. Terima kasih atas segalanya! Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
12. NASI LENGKO yang selalu menghibur penulis dengan kekonyolannya dan kebohongannya, Romi Sismadisar, Mutia Rizki, dan Dyah Kusuma Wardhani. Terima kasih sudah membantu dan menghibur penulis, semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
13. Teman kecilku, Irene Silva Jasmine yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semuanya! Tetap semangat menjalani hidup ini karena kamu berharga. Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
14. Teman-teman satu dosbing, Haidar Fakhri Simbolon, Anggiyaza Adha, Adiba Jeyhan, Irfan Efendi, Willa, Ayang, dan Alvi yang selalu membantu, memberi saran, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!
15. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2014, yang selalu mau direpoti oleh penulis dengan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semesta selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup!

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan oleh karenanya demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Mei 2018

Ruth Stephany Santoso



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	15
3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	17
4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik	20
B. Implementasi Kebijakan Publik	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	21
2. Model Implementasi Kebijakan Publik	22
C. Program	29
1. Definisi Program	29
2. Hubungan Kebijakan dengan Program	31
3. Implementasi Program	32
D. Desa	34
1. Pengertian dan Struktur Pemerintah Desa	34
2. Klasifikasi dan Status Desa	40
E. Dana Desa	42
1. Pengertian Dana Desa	42
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa	45
3. Roadmap Dana Desa	48
4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	50
5. Mekanisme Penggunaan Dana Desa	55
F. Pembangunan Desa	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	64
B. Fokus Penelitian.....	65
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	68
D. Jenis dan Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Instrumen Penelitian	74
G. Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
1. Kabupaten Malang	79
a. Visi dan Misi Kabupaten Malang	79
b. Aspek Geografis	82
c. Aspek Demografi	87
2. Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang	89
a. Visi dan Misi Desa Pujon Kidul	89
b. Wilayah Administratif	95
c. Kependudukan atau Demografi	99
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pujon Kidul	101
B. Penyajian Data	115
1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pujon Kidul	115
a. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	120
1) Dasar Hukum yang Digunakan dalam Implementasi Program Dana Desa	120
2) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa	122
3) Manfaat dari Adanya Dana Desa	126
4) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa	142
5) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa	146
6) Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	148
7) Sumber Daya yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	156
b. Konteks Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)	163
1) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa	163
2) Tanggapan yang Diberikan oleh Aktor yang Terlibat dalam Program Dana Desa	164
c. Hasil Kebijakan	167
1) Dampak dari Adanya Dana Desa	167
a) Dampak Terlihat (<i>Output</i>)	169
b) Dampak Tidak Terlihat (<i>Outcome</i>)	169

2) Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya Dana Desa	170
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	173
a. Faktor Pendukung	173
b. Faktor Penghambat	177
C. Analisis Data dan Pembahasan	183
1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pujon Kidul	183
a. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	188
1) Dasar Hukum yang Digunakan dalam Implementasi Program Dana Desa	188
2) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa	191
3) Manfaat dari Adanya Dana Desa	193
4) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa	201
5) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa	203
6) Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	206
7) Sumber Daya yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	209
b. Konteks Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)	208
1) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa	211
2) Tanggapan yang Diberikan oleh Aktor yang Terlibat dalam Program Dana Desa	213
c. Hasil Kebijakan	215
1) Dampak yang Diterima dari Adanya Dana Desa	215
a) Dampak Terlihat (<i>Output</i>)	215
b) Dampak Tidak Terlihat (<i>Outcome</i>)	216
2) Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya Dana Desa	218
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa	219
a. Faktor Pendukung	219
b. Faktor Penghambat	220

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	222
B. Saran	226

DAFTAR PUSTAKA	227
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Judul	Hal
Tabel 1. Pembagian Kecamatan di Kabupaten Malang	84
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2017	88
Tabel 3. Tingkat Kesuburan Tanah	97
Tabel 4. Pemetakan Lahan Produktif	98
Tabel 5. Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlah	100
Tabel 6. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul	133
Tabel 7. Daftar Pejabat Pemerintah Desa Pujon Kidul	152
Tabel 8. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pujon Kidul	153
Tabel 9. Daftar Anggota LPMD Desa Pujon Kidul	153
Tabel 10. Daftar Anggota BUMDes Desa Pujon Kidul	154



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
Gambar 1.	Tahap-Tahap Kebijakan Publik William Dunn	17
Gambar 2.	Model Implementasi Kebijakan Grindle	28
Gambar 3.	Roadmap Dana Desa	49
Gambar 4.	Skema Penyaluran Dana Desa	51
Gambar 5.	Model Analisis Data Interaktif	78
Gambar 6.	Lambang Kabupaten Malang	79
Gambar 7.	Peta Administrasi Kabupaten Malang	85
Gambar 8.	Peta Desa Pujon Kidul	96
Gambar 9.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK)	102
Gambar 10.	Pendapatan Desa Pujon Kidul APBDes 2017	117
Gambar 11.	Belanja Desa Pujon Kidul APBDes 2017	118
Gambar 12.	Pengelolaan Sampah di TPST Desa Pujon Kidul	127
Gambar 13.	Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Pujon Kidul	128
Gambar 14.	Kegiatan Pemberdayaan Wanita di Kantor Desa Pujon Kidul	128
Gambar 15.	Cafe Sawah Desa Pujon Kidul	130
Gambar 16.	Pemuda POKDARWIS yang Bekerja di Cafe Sawah	131
Gambar 17.	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di RT 02/01	136
Gambar 18.	Pembangunan Jalan (Rabat Beton) di RT 18/09	137
Gambar 19.	Pembangunan Jalan (Rabat Beton) di RT 11	138
Gambar 20.	Musyawarah Desa dalam Rangka Merumuskan RPJMDes	147
Gambar 21.	Transparansi RPJMDes melalui <i>Website</i> Desa Pujon Kidul	150
Gambar 22.	Transparansi Penggunaan APBDes Tahun 2017	151
Gambar 23.	Penjualan Pelayanan Wisata Desa Pujon Kidul melalui <i>Website</i>	159
Gambar 24.	Kumpulan Video Profil Desa Pujon Kidul melalui <i>Website</i>	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan dengan menentukan alternatif atau pilihan yang akan digunakan dalam prosesnya. Carl Friedrich menyatakan (dalam Santoso, 2009:35) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik sangatlah berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanyalah menjadi sebuah wacana dan tidak menjadi manfaat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam sebuah kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang berhasil dilakukan pemerintah tidak lepas dari adanya perumusan kebijakan yang matang. Kebijakan tersebut berupa regulasi, peraturan, serta keputusan yang dibuat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati selanjutnya akan diimplementasikan atau diterapkan di lingkungan tertentu, yang akan berguna sebagai alat pemecah masalah.

Implementasi kebijakan publik ini diwujudkan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan kebijakan pembangunan pada desa-desa menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah. Hal tersebut ditetapkan dalam NAWACITA 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK pada poin ketiga, yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Desa diberikan amanah seluas-luasnya oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan potensinya agar mencapai peningkatan pembangunan nasional serta untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana tujuan dan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2). Poin ketiga dari NAWACITA tersebut kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka desa diberikan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan desa.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki ikatan keluarga yang rapat dan mempunyai kaidah sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, serta memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Agar desa dapat melaksanakan kewenangan desa dalam melakukan pembangunan desa, maka sumber pendapatan atau penerimaan kepada desa sangatlah penting terhadap penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai pembangunan nasional. Wasistiono (2002) menegaskan bahwa pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya, pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follows function*). Oleh karena itu, dalam pemberian kewenangan kepada desa harus diiringi dengan pemberian anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan kewenangan tersebut.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar, yang kemudian disebut dengan Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu program nasional yang dibuat oleh Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai tahun 2015 hingga saat ini. Setiap tahun, Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa di Indonesia. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2018).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa APBDesa mempunyai tiga sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, serta pendapatan lain-lain. Dana Desa merupakan salah satu bantuan dana dari Pemerintah Pusat kepada desa yang dikategorikan dalam pendapatan transfer. Sebelum adanya bantuan Dana Desa (DD), desa-desa di Indonesia sebelumnya sudah menerima pemasukan lain yang memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari Dana Desa (DD), yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan salah satu pendapatan desa yang termasuk dalam golongan pendapatan transfer. Perbedaan mendasar antara Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terletak pada sumber pemberiannya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyatakan bahwa definisi dari Dana Desa (DD) yaitu sebagai berikut:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Lain halnya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa definisi dari Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dari pernyataan tersebut, maka dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan salah satu dari pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa dimanfaatkan oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa pada dasarnya dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelola hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Prioritas mengenai penggunaan Dana Desa ini dilaksanakan sesuai dengan keadaan desa masing-masing. Dengan adanya Dana Desa ini, setiap desa diharapkan untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui

pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menerima bantuan Dana Desa. Dana Desa tersebut diberikan untuk meningkatkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 37 Tahun 2017 tentang Besaran Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, pada tahun anggaran 2017, Kabupaten Malang telah menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp. 312.979.737.000. Bantuan Dana Desa tersebut dibagi kepada 378 desa yang tersebar pada 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 Desa Pujon Kidul menerima Dana Desa sebesar Rp. 831.968.000, sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 37 Tahun 2017 tentang Besaran Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa yang terkenal akan pengembangan desa wisatanya di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa yang telah menerima penghargaan Desa Wisata Agro oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada ajang Desa Wisata Award ini juga tidak terlepas dari berjalannya pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibangun dari adanya Dana Desa (Radar Malang, 2017).

Penelitian mengenai Dana Desa, khususnya penelitian mengenai implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang ini difokuskan pada penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Fokus dari penelitian ini di dasari oleh teori implementasi kebijakan dari Grindle untuk melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut hingga hasil atau dampak yang diterima oleh masyarakat Desa Pujon Kidul dari adanya Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana pengimplementasian dari program Dana Desa di Desa Pujon Kidul dalam rangka pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan desa yang tertulis dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, maka penjabaran mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang mampu memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Dapat menambah kajian teoritis dalam lingkup administrasi publik, terutama dalam bidang ilmu kebijakan publik.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian atau studi lanjutan dengan topik terkait Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang).

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah di Desa Pujon Kidul dalam hal Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran terkait pembahasan penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) di antaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian sehingga peneliti ingin mengetahui lebih rinci mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang). Kemudian peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang; dan 2) Apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat pada implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Pada bab ini dijelaskan tujuan penelitian yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah dan manfaat penelitian yang meliputi kontribusi akademis dan praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat beberapa teori pokok yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang), yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Program, Teori Implementasi Program, serta Teori Pembangunan Desa. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan

sebagai instrumen analisis data yang didapatkan peneliti di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang), yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang ada di lapangan, yang berkaitan dengan implementasi dari program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Selain itu juga dijelaskan mengenai analisis data yang sudah diperoleh dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian yang ada di lapangan. Selain itu dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti juga dapat memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Pfiffner dan Presthus menyatakan bahwa dalam administrasi publik terdapat proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah (Syafiie, 2006:23). Kebijakan pemerintah atau yang dapat disebut sebagai kebijakan publik merupakan salah satu bagian terpenting dalam administrasi publik. Dalam memahami konsep mengenai kebijakan publik, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian dari kebijakan publik. Pengertian mengenai kebijakan publik menurut Easton (dalam Santosa, 2009:27) adalah tanggapan dari suatu sistem terhadap tuntutan yang timbul dari lingkungannya. Selanjutnya Carl Friedrich (dalam Santoso, 2009:35) menyatakan bahwa pengertian dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

John Lock (dalam Sadhana, 2012:49) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses dan tidak sekedar sebagai suatu sistem dan apabila perlu, dapat dipaksakan berlakunya karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintah sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan, sehingga tercapai dan terwujud tujuan beserta

keputusan-keputusan lainnya dalam kebijakan tersebut, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik (dalam Thoha, 2008:108), yaitu bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan.

Beberapa definisi mengenai kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk kepentingan publik. Kebijakan yang telah diambil tidak hanya berdasarkan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga dapat memiliki dampak yang cukup besar, sebagaimana besarnya dampak apabila pemerintah mengambil tindakan. Kepentingan publik yang menjadi tujuan dari kebijakan publik tersebut merupakan keseluruhan utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan serta tuntutan-tuntutan dari publik, yang kemudian terkumpul dan nampak dalam kondisi dan situasi tertentu sebagai masalah publik (*public issue*) (Sadhana, 2012:50).

Kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik harus sesuai dengan norma-norma yang ada pada publik. Ukuran normatif dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah lingkungan, pelayanan, pertanggung jawaban administrasi dan analisis yang etis. Pemikiran mengenai kebijakan publik menurut Parson (2006:3) mengandung anggapan bahwa terdapat satu ruang dalam kehidupan yang bukan privat, melainkan milik bersama. Oleh karena itu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan (*financial*), dan sumber daya manusia untuk kepentingan publik.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan serta memiliki ciri khusus, yaitu bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh sebagian besar orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Easton (dalam Wahab, 2008:5) menyebutkan bahwa “orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, para monarki dan lain sebagainya.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat dalam kebijakan publik, yaitu bahwa kebijakan publik bersumber dari perumusan orang-orang yang

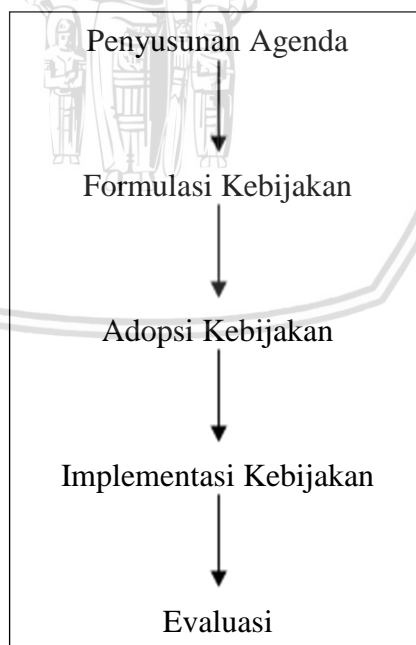
kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem politik dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik serta berhak mengambil tindakan tertentu, sepanjang masih dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Ciri-ciri dari kebijakan publik tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- b. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan merupakan tindakan yang terencana.
- c. Kebijakan publik bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun berbentuk negatif. Kebijakan publik dapat berbentuk positif memiliki pengertian bahwa kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi masalah tertentu (*public issue*). Sedangkan pengertian kebijakan publik dapat berbentuk negatif yaitu bahwa kebijakan publik mungkin akan meliputi keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir dengan melalui proses atau tahapan yang panjang hingga sampai kepada tahap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Suatu pencapaian dalam kebijakan publik tidak dapat terlepas dari tahapan dalam proses perumusan dari kebijakan publik tersebut. Langkah-langkah perumusan kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Winarno, 2007:32) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik William Dunn

Sumber: Winarno (2007:32)

Berikut penjelasan dari gambar di atas:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah yang ada pada agenda publik sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah kebijakan tersebut, kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan 'bermain' untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkatannya. Kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang berlaku di Indonesia pada dasarnya merupakan segala bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, daerah, hingga tingkatan lokal, yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Nugroho (2011:104) mengelompokkan bentuk-bentuk kebijakan publik yang berlaku di Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau mendasar atau umum, seperti: UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, seperti: Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota, serta dapat pula berupa SK (Surat Keputusan) bersama antar menteri dan antar bupati atau wakil.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti: peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, dan Walikota.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Setelah proses pembuatan kebijakan telah menghasilkan suatu kebijakan, selanjutnya kebijakan publik masuk dalam tahapan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya serta merupakan aspek yang paling penting dalam proses kebijakan. Tahir (2014:56) menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Grindle (dalam Wibawa, 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kemudian Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 1994:15) menyatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan

(*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknis secara sinergis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2015:133).

Beberapa uraian yang dikemukakan mengenai implementasi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Fokus utama dari kebijakan adalah di mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya dalam merealisasikan kebijakan pemerintah yang telah dibuat tersebut dapat dilihat dari beberapa model. Dari berbagai macam model implementasi kebijakan yang ada, terdapat salah satu model yaitu *Implementation as a Political and Administrative Process* yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program

kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, di mana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) (Agustino, 2012). Berikut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari model implementasi kebijakan publik Grindle (dalam Agustino, 2012), yaitu:

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan kelompok sasaran (*interest of the target groups*)

Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak

kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) Tipe manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*)

Dalam isi kebijakan (*content of policy*) telah dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*)

Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Dalam *content of policy* yang akan dijelaskan pada poin ini adalah berapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu implementasi haruslah memiliki skala yang jelas. Hal ini mengharuskan adanya pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut

harus dirumuskan secara jelas, dikuantifikasikan, spesifik, dipahami, dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Pengambilan keputusan memiliki peranan yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Pada bagian ini menjelaskan di mana posisi pengambil keputusan dari sebuah implementasi suatu kebijakan.

5) Pelaksana program (*program implementor*)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan haruslah didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan. Penetapan pelaksana implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga menetapkan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing pelaksana.

6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya alam, sumber

daya keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumber daya keuangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadana masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu didukung dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai, maka akan mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam implementasi sebuah kebijakan.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*)

Dalam sebuah kebijakan juga perlu mempertimbangkan mengenai strategi, kepentingan, serta kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana peluang untuk partisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi para pelaksana tujuan resmi. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka kemungkinan besar program yang hendak

diimplementasikan akan berjalan jauh dari apa yang sudah diharapkan.

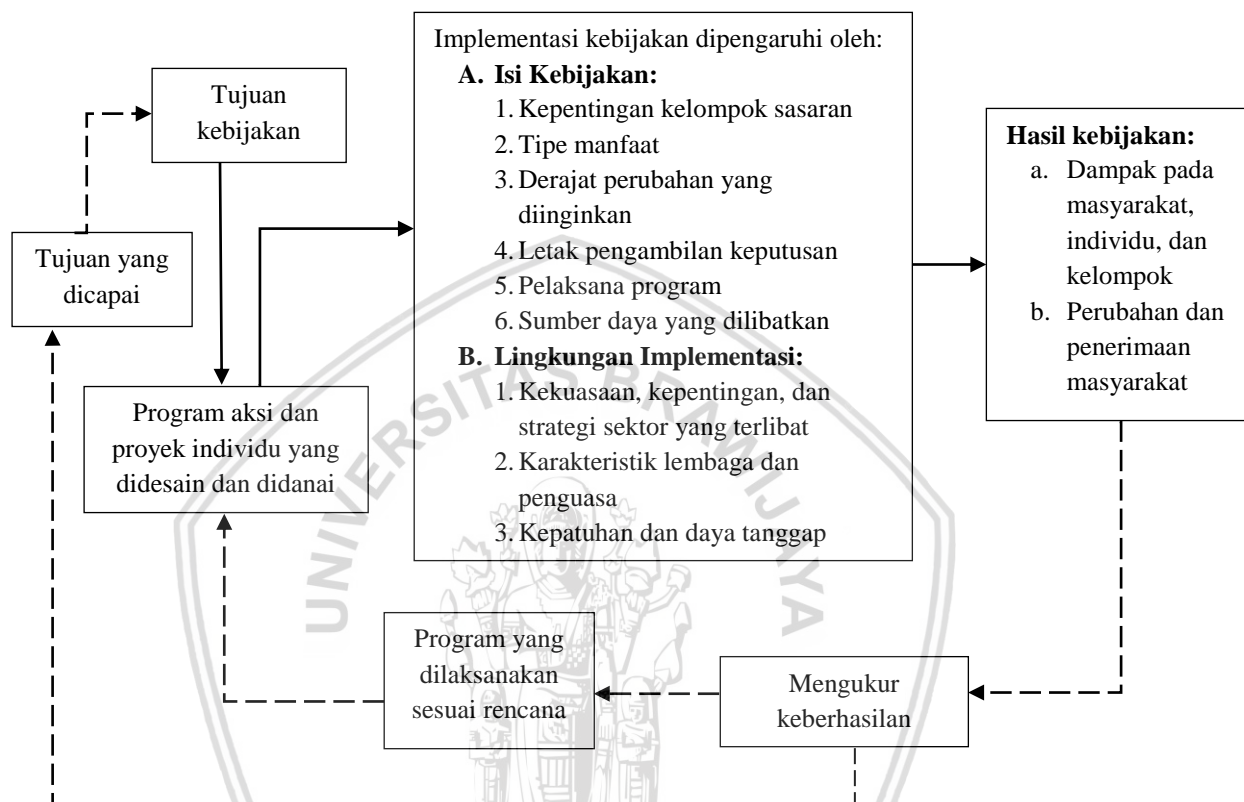
b) Karakteristik institusi dan penguasa (*institution and regime characteristic*)

Pada implementasi kebijakan, lingkungan juga memiliki pengaruh dalam hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah tersedia, namun kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kelemahan pada struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerja sama orang yang tidak sedikit. Ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal tersebut akan menyebabkan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dan harus melakukan koordinasi dengan baik.

c) Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (*responsiveness and compliance*)

Kepatuhan dan respon dari pelaksana memiliki pengaruh penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam poin ini akan dijelaskan mengenai seberapa penting dan sejauh mana kepatuhan serta respon dari pelaksana kebijakan.

Berikut adalah gambaran mengenai model implementasi kebijakan publik menurut Grindle:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber: Safkaur, Vol. 12 (2014:15)

Dari gambar tersebut, Grindle menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik. Dengan ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik tanpa adanya syarat-

syarat tersebut hanya akan menjadi wacana saja. Implementasi kebijakan sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada perumusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial, karena mau bagaimanapun baiknya kebijakan tersebut dibuat atau dirumuskan, tetapi tetap tidak berguna apabila tidak diimplementasikan.

C. Program

1. Definisi Program

Program dapat dikatakan sebagai suatu rancangan atau pokok usaha yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Arikunto (1998) menyatakan bahwa program merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga pencapaian program tersebut dapat diukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari program dinyatakan sebagai suatu rancangan yang di dalamnya berisikan asas-asas serta atau dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan dan perekonomian. Program merupakan salah satu komponen yang dalam ada di dalam suatu kebijakan. Program merupakan sarana pemerintah dalam meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi, anggaran atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.” Program dibuat dengan tujuan agar segala rencana yang telah disusun dan dirancang dapat berjalan dengan baik dan optimal, yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Terry (dalam Tachjan, 2006:32) mengemukakan bahwa:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can included objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets” (program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan, program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget).

Selanjutnya, Grindle (dalam Tachjan 2006:33) menyatakan bahwa isi program harus menggambarkan enam aspek berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Status pembuat keputusan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang di

dalamnya terdapat tujuan, sasaran, proses kegiatan, maupun waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program.

2. Hubungan Kebijakan dengan Program

Kebijakan dan program dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang disengaja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arikunto (1988:1) yang menyatakan bahwa definisi dari program sebagai sederet kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tachjan (2006:33) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan implementasi program. Struktur implementasi antara kebijakan dengan program dinyatakan oleh Nugroho (dalam Utowo, 2013:19) bahwa struktur implementasi kebijakan, program berada di bawah kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Tachjan, 2006:31) yang menyatakan bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.* (implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan sebuah program).”

Kebijakan akan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan, sedangkan program membutuhkan baik dorongan, aturan, maupun implementasi. Komponen program perlu adanya dorongan, aturan yang jelas, dan bagaimana proses dari implementasi yang saling berhubungan dari ketiga komponen tersebut, yaitu kebijakan akan dapat

mencakup sejumlah program. Menurut Akib dan Tarigan (2008:11) mengenai keberhasilan kebijakan atau program ialah:

“Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program.”

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan dan program yaitu kebijakan akan selalu berhubungan dengan bagaimana dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antara kebijakan dan program yaitu program merupakan suatu wujud aksi kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu. Nantinya, tujuan yang ingin dicapai itu sudah ditentukan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut dapat dicapai melalui program tertentu. Dengan kata lain, program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan program dapat digunakan sebagai langkah untuk mencapai tujuan.

3. Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlibat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan, yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan

output dan *outcome* bagi masyarakat. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk dilaksanakan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun kemudian dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat, maka program tersebut harus dilakukan oleh *stakeholder* yang berkepentingan.

Implementasi program tidak hanya berisikan mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani, sesuai dengan pernyataan Tachjan (2006:33). Implementasi program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dalam hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Tachjan, 2006:33) yang menyatakan bahwa program harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang hendak dicapai;
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;
- c. Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;
- d. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Dalam implementasi program, terdapat kriteria pengukur keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (dalam Akib dan Tarigan, 2008:14) yang di dasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Selain itu menurut Tachjan (2006:34) pada tahap implementasi program, ada beberapa urutan atau tahapan yang dapat diketahui itu akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

- a. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu;
- b. Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

D. Desa

1. Pengertian dan Struktur Pemerintah Desa

Kata desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, yaitu '*deca*' yang berarti tanah air, tanah kelahiran, maupun tanah asal. Sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara (Huda, 2014:361). Secara historis, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat dan

pemerintahan di Indonesia. Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut UUD Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa beserta hak-hak tradisionalnya harus tetap didasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari gagasan hukum tersebut menyebabkan adanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan-ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda (Huda, 2007:7).

Pengertian mengenai desa dijelaskan dalam Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 43 yaitu sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sejalan dengan pernyataan mengenai pengertian desa menurut UU Desa, Sutardjo Kartohadikusumo (1953) mengemukakan bahwa desa secara administratif diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Secara sosiologis, definisi dari desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan di mana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Desa dapat disimpulkan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki ikatan keluarga yang rapat dan mempunyai kaidah sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, serta memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan yang dimiliki desa telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada pasal 19 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai bagaimana kewenangan desa, yaitu meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Pelaksanaan kewenangan desa yang telah disebutkan di atas tersebut tidak dijelaskan lebih rinci dikarenakan kewenangan tersebut diurus oleh desa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Desa dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Desa, sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf atau yang dapat disebut sebagai perangkat desa. Kepala Desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membuat Rencana Strategis Desa (Renstra Desa). Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, yaitu bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 61 huruf a, yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa pasal 48, kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan haknya wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, serta menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 48 menjelaskan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya selain dibantu Badan Permusyawaratan Desa juga dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

2. Klasifikasi dan Status Desa

Klasifikasi serta status kemajuan dan kemandirian desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan sebagai alat untuk melakukan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dijelaskan mengenai lima klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Klasifikasi ini didasarkan atas penghitungan kuantitatif dari Indeks Desa Membangun dengan nilai ambang batas sebesar 0,566, yang dimanfaatkan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Penjelasan mengenai lima klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama), yaitu desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa dengan status ini memiliki nilai rata-rata kuantitatif Indeks Desa Membangun yaitu sebesar $\leq 0,491$.
- b. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya), yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa dengan status ini memiliki nilai rata-rata kuantitatif Indeks Desa Membangun yaitu sebesar $> 0,491$ dan $\leq 0,599$.
- c. Desa Berkembang (Desa Madya), yaitu desa yang potensial untuk menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa dengan status ini memiliki nilai rata-rata kuantitatif Indeks Desa Membangun yaitu sebesar $> 0,599$ dan $\leq 0,707$.

- d. Desa Maju (Desa Pra-Sembada), yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa dengan status ini memiliki nilai rata-rata kuantitatif Indeks Desa Membangun yaitu sebesar $> 0,707 \leq 0,815$.
- e. Desa Mandiri (Desa Sembada), yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa dengan status ini memiliki nilai rata-rata kuantitatif Indeks Desa Membangun yaitu sebesar $> 0,815$.

E. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 telah menegaskan pengakuan negara atas desa terhadap kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini juga harus diikuti dengan pemberian sumber daya kepada desa agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

yang disebut sebagai APBDesa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas tiga, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain-lain.

Dari tiga klasifikasi pendapatan desa tersebut, Dana Desa merupakan salah satu bagian dari kelompok transfer, yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 mengenai kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), yang terdiri atas:

- a. Dana Desa (DD);
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pendapatan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dana Desa merupakan salah satu bagian dari kelompok transfer dalam pendapatan desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelum adanya kebijakan Dana Desa (DD), desa-desa di Indonesia sebelumnya sudah menerima pemasukan lain yang memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari Dana Desa (DD), yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan mendasar antara Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber pemberiannya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyatakan bahwa definisi dari Dana Desa yaitu sebagai berikut:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Lain halnya dengan Alokasi Dana Desa yang merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa definisi dari Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan salah satu dari pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa dimanfaatkan oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengamanahkan bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa yang tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya. Kegiatan tersebut di antaranya:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

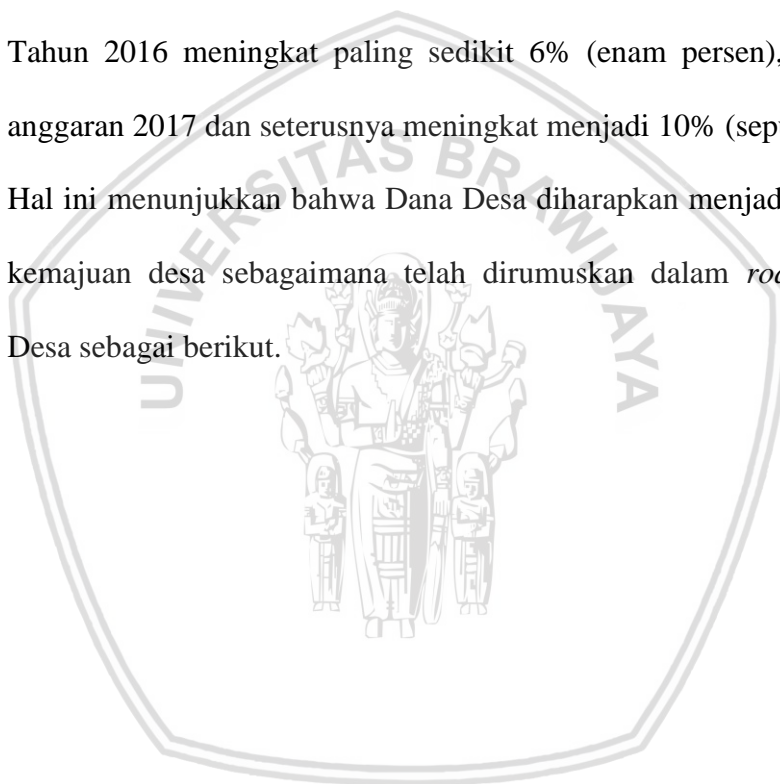
Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dinyatakan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas yang diatur oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

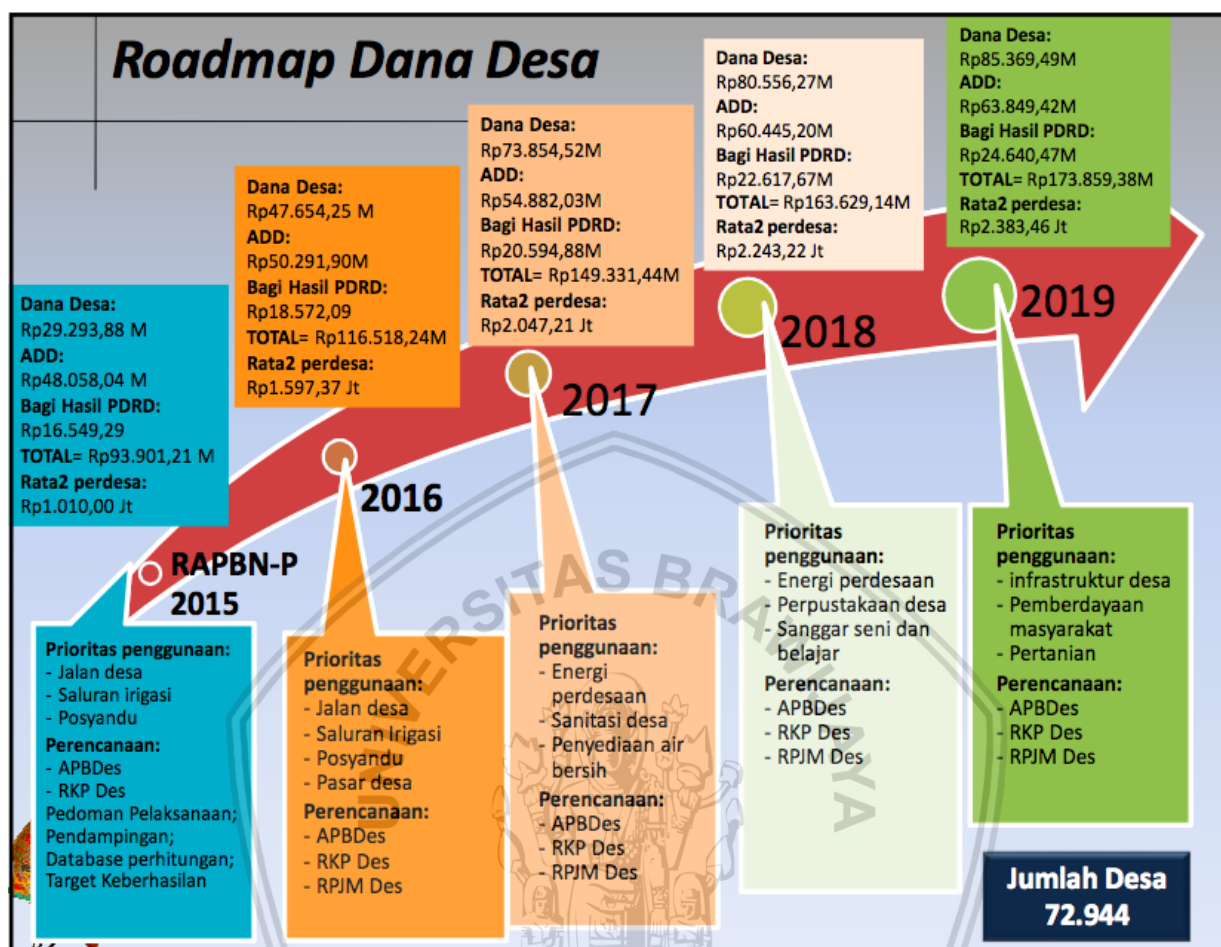
Sisi positif dari pengaturan penggunaan Dana Desa yang telah dijelaskan di atas adalah desa dapat memiliki keleluasaan dalam menentukan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Di sisi lain, Pemerintah Desa juga harus berhati-hati dalam mengakomodasi daftar usulan kegiatan pembangunan yang biasanya meningkat pasca masuknya dana pembangunan, salah satunya adalah Dana Desa ini. Rekam pengalaman pembangunan desa selama ini menunjukkan masih tingginya tingkat kebutuhan pembangunan yang harus dilakukan, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang memberi dorongan pada peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga seringkali Dana Desa

yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat mampu menampung semua usulan masyarakat.

3. Roadmap Dana Desa

Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN tahun 2015 paling sedikit 3% (tiga persen) dari anggaran transfer ke daerah. Tahun 2016 meningkat paling sedikit 6% (enam persen), serta tahun anggaran 2017 dan seterusnya meningkat menjadi 10% (sepuluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa diharapkan menjadi pengungkit kemajuan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam *roadmap* Dana Desa sebagai berikut.





Gambar 3. Roadmap Dana Desa

Sumber: Kebijakan Umum Dana Desa berdasarkan UU No.6/2014 dan PP No. 60/2014, (<https://twitter.com/DitjenPPMD/status/643322663729954816>)

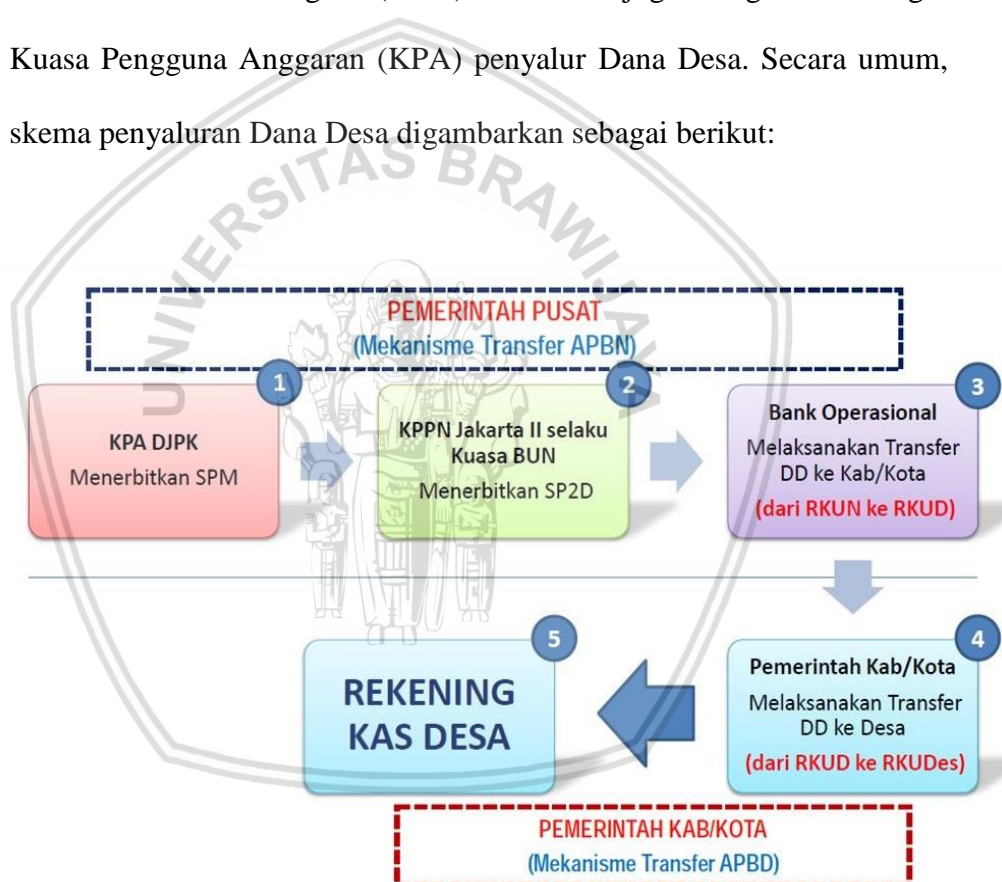
Dari gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya, pemberian bantuan Dana Desa kepada setiap desa akan semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Dana Desa yang semakin meningkat setiap tahunnya. Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun pun berbeda-beda. Di mulai dari tahun 2015, diharapkan setiap desa mengutamakan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan jalan,

saluran irigasi, dan posyandu. Selanjutnya pada tahun 2016 diharapkan setiap desa mengutamakan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan jalan, saluran irigasi, posyandu, dan ditambah pasar desa. Hal ini dilakukan agar setiap desa dapat meningkatkan perekonomiannya melalui pasar desa. Setelah pembangunan infrastruktur dasar dirasa telah terpenuhi, maka prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2017 diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan energi perdesaan, sanitasi desa, serta penyediaan air bersih. Kemudian di tahun 2018, prioritas penggunaan Dana Desa pun lebih ditingkatkan kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan pengadaan sanggar seni dan belajar desa serta pengadaan perpustakaan. Hingga pada tahun 2019, prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur desa, pemberdayaan desa, dan pertanian, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, proses penyaluran Dana Desa secara garis besar dibagi dalam dua tahap, yaitu penyaluran dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap kedua yaitu

penyaluran dana dari kabupaten ke desa melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Mulai tahun 2017, penyaluran Dana Desa melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Kantor vertikal Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini selain sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah juga ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyalur Dana Desa. Secara umum, skema penyaluran Dana Desa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Skema Penyaluran Dana Desa

Sumber: KPPN Metro (<http://kppnmetro.org/wp-content/uploads/2015/09/penyaluran-dana-desa1.jpg>)

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%,
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%;

Sedangkan peraturan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD diatur dalam pasal 18 dan 19, yaitu bahwa:

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I harus menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua di bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.

Terkait penyaluran Dana Desa tersebut, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Gubernur. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya. Proses penyaluran Dana Desa tidak bisa dilakukan apabila Kepala Desa tidak memberikan laporan perencanaan pembangunan desa kepada Bupati/Walikota. Proses perencanaan pembangunan desa tersebut meliputi penyusunan RPJM-Des, RKP dan APBDes, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penyusunan perencanaan tersebut diawali dengan adanya musyawarah desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Secara substansial Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Untuk Rancangan RKP Desa harus merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

5. Mekanisme Penggunaan Dana Desa

Secara umum, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan penggunaannya tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Adapun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

- 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:
- 1) Pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;

- 3) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) Pengembangan benih lokal;
 - 8) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) Pengelolaan padang gembala;
 - 12) Pengembangan Desa Wisata;
 - 13) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:
- 1) Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain *zircon*, *kaolin*, *zeolite*, *bentonit*, *silika* (pasir kuarsa), *kalsit* (batu kapur/gamping), *felspar*, dan intan.

- 2) Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
- 3) Rumput laut;
- 4) Hutan milik desa;
- 5) Pengelolaan sampah.

Sedangkan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan

- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, Bupati memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

F. Pembangunan Desa

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Siagian (2007:4) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu negara bangsa untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national-building*). Dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Pembangunan dilakukan secara sadar dan terencana, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dengan pembangunan diharapkan suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Indonesia sebagai suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang telah direncanakan dengan rentan waktu lima tahunan dalam satu periode pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Pembangunan perdesaan memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pembangunan perdesaan di Indonesia selalu menjadi

fokus perhatian pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini pembangunan perdesaan telah dilaksanakan melalui pengembangan lembaga-lembaga perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Sejarah mengenai pembangunan desa di Indonesia di mulai pada awal kemerdekaan, yang dikenal dengan Rencana Kesejahteraan Kasimo atau *Kasimo Welfare Plan* pada tahun 1952. Pembangunan yang didasarkan pada teori modernisasi tersebut identik dengan pembangunan pertanian karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan dilakukan dengan mengadakan semacam *demonstration plot* yang memberikan contoh teknik bertanam yang baik. Namun dikarenakan kurangnya dana dan keahlian, rencana Kasimo tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pembangunan desa baru mulai digalakkan kembali pada masa Orde Baru. Pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahun 1956-1961 tersebut dikenal dengan nama Rencana Juanda, disusun oleh Biro Perancang Negara dengan menerapkan konsep *Community Development* (Adisasmita, 2013:73). Dalam rezim Orde Baru, paradigma pembangunan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan peningkatan produktivitas serta pemasaran secara luas (internasional) pada sektor pertanian melalui program Bimbingan Masal (Bimas).

Pada hakikatnya, tujuan umum dari pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, dengan tetap memerhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Adisasmita (2013:58) menjelaskan bahwa pembangunan perdesaan dilaksanakan meliputi berbagai bidang, disusun dalam berbagai program dan proyek pembangunan yang dapat dirinci ke dalam tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan di bidang pertanian secara berkelanjutan;
2. Konservasi lingkungan;
3. Pembangunan industri perdesaan;
4. Pembangunan sumber daya manusia (SDM);
5. Pembangunan infrastruktur fisik;
6. Pembangunan kelembagaan ekonomi dan sosial; dan
7. Pembangunan partisipasi masyarakat.

Dalam pembangunan perdesaan, yang perlu ditingkatkan adalah sub-sub sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Di samping itu, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan keikutsertaan para petani, nelayan, serta masyarakat desa pada pembangunan usaha desa melalui kelompok-kelompok tani maupun nelayan serta koperasi perdesaan. Selain itu juga perlu ditingkatkan pengembangan sistem perdesaan yang menjamin harga yang layak bagi petani dan nelayan produsen maupun konsumen, serta

memberikan kemudahan bagi petani dan nelayan dalam memanfaatkan fasilitas dana untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pembangunan desa dalam pelaksanaan kegiatannya juga memerlukan kerja sama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antara wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antara kota dengan daerah perdesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Dengan kerja sama antar daerah, maka daerah-daerah yang saling berdekatan tersebut dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang. Hal tersebut bertujuan untuk mengusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian, perikanan, dan sektor lainnya.

Adisasmita (2013:75) menyatakan bahwa pembangunan perdesaan dalam penerapannya haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut, yaitu; transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), dan berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan haruslah dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pembangunan haruslah melibatkan masyarakat, dalam hal ini pembangunan perdesaan haruslah melibatkan masyarakat desa dalam menentukan visi pembangunan masa depan desa yang akan diwujudkan. Masa depan yang dimaksudkan adalah impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik, dalam artian tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Narbuko dan Achmadi (1991:71) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga peneliti harus menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Searah dengan definisi tersebut, Zuriah (2009:111) menambahkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data yang relevan.

Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 1996:17) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Kirk dan Miller (dalam Zuriah, 2009:56), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan suatu gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai situasi yang akan diteliti. Menurut Moleong (2007:94) ada dua tujuan dari penentuan fokus suatu penelitian, antara lain:

1. Penetapan fokus membatasi studi dalam penelitian.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Hal tersebut memudahkan peneliti dalam penelitian dan mengumpulkan data.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan Grindle sebagai dasar dari fokus kajian penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang), dilihat dari:

a. Isi kebijakan (*content of policy*) yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi program Dana Desa.
- 2) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam perumusan penggunaan Dana Desa.
- 3) Manfaat dari adanya Dana Desa, dilihat dari:
 - a) Manfaat dari adanya Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
 - b) Manfaat dari adanya Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa.
- 5) Letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa.
- 6) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa.
- 7) Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Dana Desa.

- b. Konteks implementasi (*context of implementation*) yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu:
 - 1) Strategi aktor yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa.
 - 2) Tanggapan yang diberikan oleh aktor yang terlibat dalam program Dana Desa.
 - c. Hasil kebijakan yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu:
 - 1) Dampak dari adanya Dana Desa, dilihat dari:
 - a) Dampak terlihat (*output*)
 - b) Dampak tidak terlihat (*outcome*)
 - 2) Perubahan yang diperoleh aktor yang terlibat dari program Dana Desa
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang):
- a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Strauss dan Islam (1993:501-51) menyatakan bahwa penetapan lokasi penelitian harus di dasari oleh tiga pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan entri berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan program Dana Desa di Kabupaten Malang.
2. Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang dapat memberikan entri berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya, dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam serta masyarakat, khususnya perangkat desa, yang sesuai dengan substansi penelitian.
3. Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu dua bulan.

Pemilihan lokasi dilanjutkan dengan memilih situs penelitian. Situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Mengingat bahwa pokok bahasan utama dari penelitian ini adalah

implementasi kebijakan Dana Desa terhadap pembangunan desa, maka untuk memperoleh data yang relevan, situs penelitian ini adalah di Kantor Desa serta BUMDes dari Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006:112) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kolaborasi dari kedua data tersebut sangat diperlukan baik untuk kelengkapan dan ketepatan informasi yang relevan terhadap data yang akan diperoleh tentang variabel-variabel penelitian. Semua data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan, kemudian akan dibuat suatu kesimpulan yang merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (Data Utama)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang diwawancarai atau dengan pengamatan secara langsung yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan

penelitian. Adapun yang menjadi subjek data primer dalam penelitian Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) adalah:

- a. Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang
 - b. Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang
 - c. Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang
 - d. Mas Fidi selaku pemuda Desa Pujon Kidul, yang tergabung dalam POKDARWIS
 - e. Mas Ilham selaku pemuda Desa Pujon Kidul, yang tergabung dalam POKDARWIS
 - f. Bapak Nurahmad selaku masyarakat Desa Pujon Kidul
2. Data Sekunder (Data Penunjang)

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh secara tidak langsung yang berupa catatan, dokumen, peraturan tertulis ataupun arsip. Studi pustaka juga dapat dilakukan untuk memperoleh kerangka pemikiran dan landasan teori yang akan membantu penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,

Peraturan Bupati Malang No. 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, laporan keuangan terkait Dana Desa pada tahun anggaran 2017, serta arsip-arsip yang terkait dengan fokus penelitian program Dana Desa di Desa Pujon Kidul.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Moleong (1996:113) mengatakan bahwa teknik penelitian atau yang dalam bahasa ini adalah teknik pengumpulan data adalah sebagai salah satu bagian penelitian yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk memperoleh data yang akurat, peneliti berusaha untuk menyesuaikan berbagai teknik pengumpulan data tersebut ke dalam situasi yang nyata. Pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua orang, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan mempunyai maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, menurut Sugiyono (2014:72). Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung, melalui tatap muka kepada pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan informasi penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara dengan Kepala Desa Pujon Kidul, Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, serta masyarakat Desa Pujon Kidul.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Moleong (1996:117) menyatakan bahwa, “Observasi (atau yang menurutnya adalah pengamatan berperan serta) menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan.” Observasi dilakukan dengan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan (mata) tanpa ada pertolongan alat lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian, terdapat tiga komponen yang menjadi objek

observasi menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2013:229). Tiga komponen tersebut adalah *place*, *actor*, dan *activities*. Peneliti dalam penelitian ini melaksanakan observasi di Kantor Desa Pujon Kidul dan lingkungan Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Observasi dilakukan kepada Kepala Desa Pujon Kidul, Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, serta masyarakat desa mengenai pengimplementasian dari program Dana Desa di Desa Pujon Kidul.

3. Dokumen

Moleong (1996:161) menyatakan bahwa, “Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.” Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, meringkas, maupun menganalisis, dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berhubungan dengan objek yang diteliti; seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-arsip penting, maupun juga berupa gambar. Dokumen yang digunakan dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam pengambilan gambar yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian ialah merekam informasi yang diberikan narasumber pada saat proses wawancara serta

dengan mengambil gambar yang berkaitan dengan kegiatan program Dana Desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pujon Kidul.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2009:223), “dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dikembangkan suatu instrumen.” Sesuai dengan pendapat tersebut, maka jenis instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri

Pada proses penelitian, peneliti sendiri merupakan komponen penting dalam pengumpulan data, terutama pada saat proses wawancara. Menurut Moleong (2006:168), peneliti sendiri dapat menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian sendiri dengan kemampuan yang ada terhadap objek yang berhubungan dengan masalah kajian penelitian untuk memperoleh data yang akan diamati. Data yang diperoleh yang paling utama berasal dari proses wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Dana Desa

dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, yang pengumpulan datanya ada di Kantor Kepala Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Sebagai alat untuk memperoleh data penelitian yang lebih relevan, peneliti menggunakan informan yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dalam melakukan wawancara. Hal tersebut merupakan panduan bagi peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan. Pedoman wawancara berupa pokok-pokok pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Perangkat penunjang

Dalam penelitian ini, perangkat penunjang yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa perlengkapan alat tulis seperti bolpoin, penghapus, penggaris, *notebook*, serta perekam suara. Selain itu peneliti juga menggunakan kamera untuk melakukan *check list* kearsipan dan membantu proses observasi di lapangan.

G. Analisis Data

Proses analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu metode penelitian. Dengan analisis data, peneliti dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Patton (dalam Moleong, 1996:103), analisis data adalah prosedur mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

analisis data Miles, Huberman, dan Saldana. Langkah-langkah yang dilakukan analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) antara lain sebagai berikut:

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian, bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh dengan cara data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Data tersebut kemudian disederhanakan, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang penting, lalu dicari tema atau polanya. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisis data yang lain, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data (*data display*)

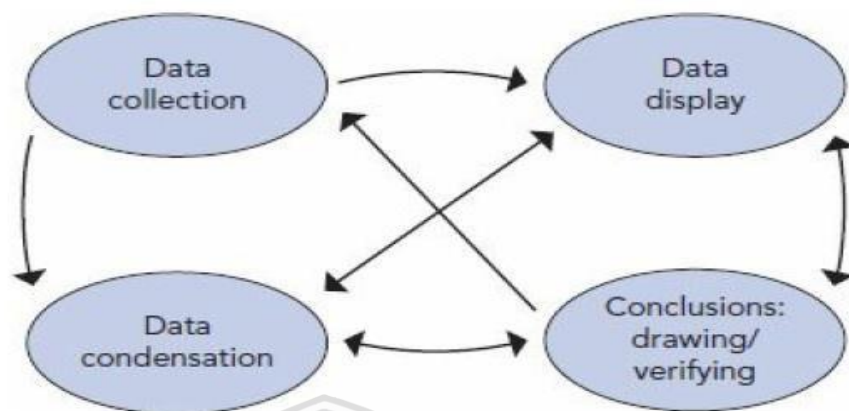
Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang

padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut saran dikiaskan sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berupa gambaran umum dari implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

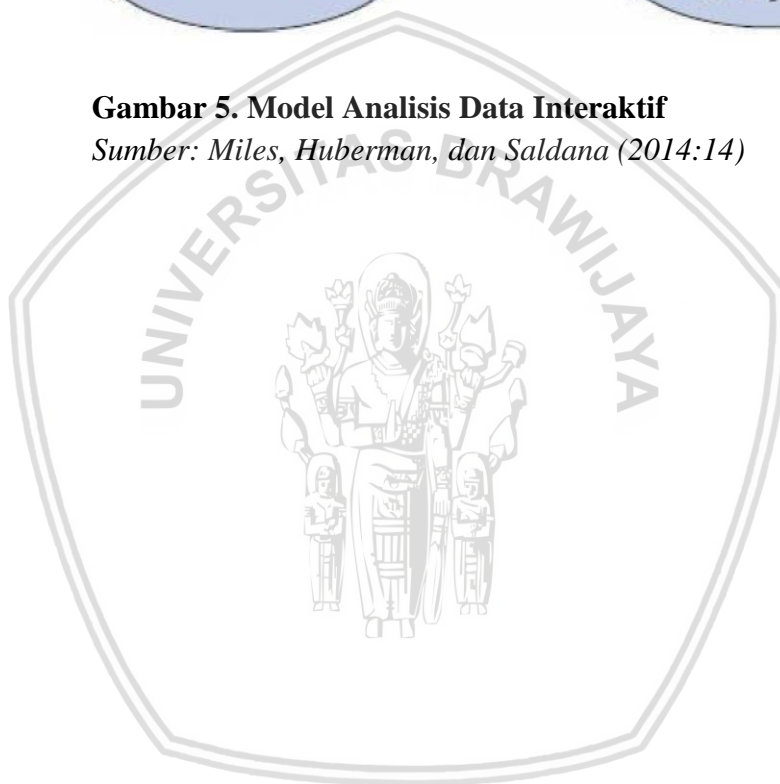
Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari kegiatan analisis, yaitu berupa pengelompokan data yang sudah diolah dan disajikan secara sistematis agar mendapatkan data yang valid dan pada akhirnya ditarik kesimpulan. Proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian hingga analisis data kemudian ditarik kesimpulan yang relevan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini sesungguhnya merupakan bagian yang paling sulit. Penarikan kesimpulan akan memadatkan pembahasan yang sangat luas tersebut menjadi pokok bahasan yang lebih singkat dan sederhana tanpa menghilangkan esensi atau arti penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyajian data dan penulisan skripsi, nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin di atas, sehingga diharapkan dalam proses penyusunan penelitian ini bisa lebih terarah. Uraian analisis di atas dapat digambarkan ke dalam gambar berikut:



Gambar 5. Model Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Malang

a. Visi dan Misi Kabupaten Malang



Gambar 6. Lambang Kabupaten Malang
Sumber: malangkab.go.id

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terkenal dengan keindahan alamnya di Indonesia. Kabupaten Malang sebagai daerah terbesar kedua di Jawa Timur memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB
MANETEP”

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Misi

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokrasi berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sumber: Visi Misi Pemkab Malang 2016-2021

b. Aspek Geografis

Kabupaten Malang merupakan suatu wilayah dan kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur, sebelum Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara $112^{\circ}17'10,99''$ - $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah $3.534,86 \text{ km}^2$ atau 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.217 rukun warga (RW), dan 14.718 rukun tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta terletak antara 0-2000m dari permukaan laut (KMDA, 2016). Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, dan

Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kab. Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto,
dan Jombang

Sebelah Timur : Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

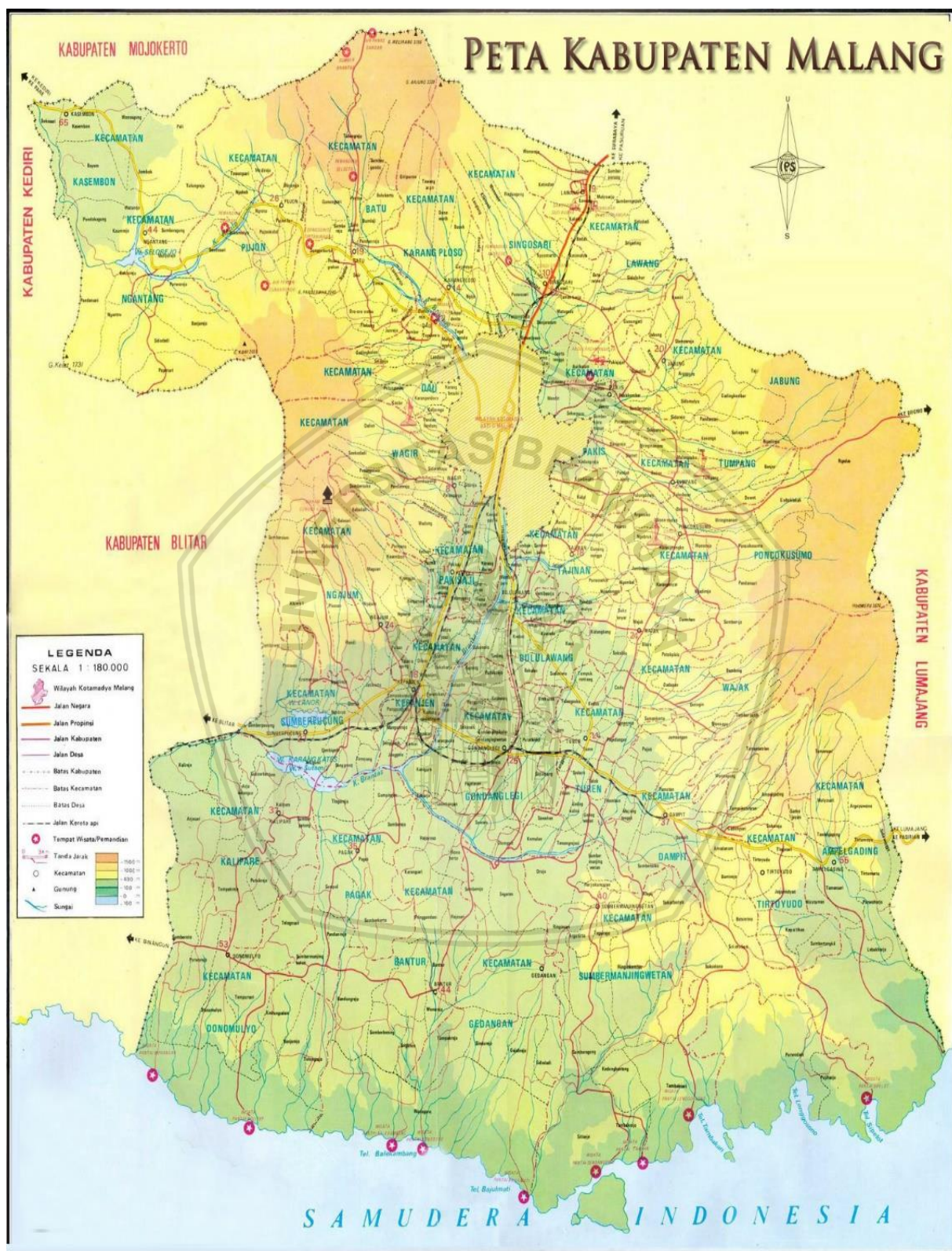
Sebelah Barat : Kab. Blitar dan Kab. Kediri

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami dengan sayuran. Daerah selatan banyak ditanami tebu hortikultura seperti salak dan semangka. Kabupaten Malang memiliki potensi untuk perkebunan kopi, cokelat, dan beberapa di bagian selatan terdapat hutan jati. Pembagian kecamatan dari Kabupaten Malang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pembagian Kecamatan Kabupaten Malang

No.	Nama Kecamatan		
1	Ampelgading	17	Ngantang
2	Bantur	18	Pagak
3	Bululawang	19	Pagelaran
4	Dampit	20	Pakis
5	Dau	21	Pakisaji
6	Donomulyo	22	Poncokusumo
7	Gedangan	23	Pujon
8	Gondanglegi	24	Sumbermanjing Wetan
9	Jabung	25	Singosari
10	Kalipare	26	Sumberpucung
11	Karangploso	27	Tajinan
12	Kasembon	28	Tirtoyudo
13	Kepanjen	29	Tumpang
14	Kromengan	30	Turen
15	Lawang	31	Wagir
16	Ngajum	32	Wajak
		33	Wonosari

Sumber: malangkab.go.id



Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Malang
Sumber: malangkab.go.id

Letak geografis dari Kabupaten Malang yang sedemikian itu menyebabkan kabupaten ini memiliki posisi yang cukup strategis dan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Kawasan selatan yang langsung berbatasan dengan bibir pantai termasuk dalam Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur pesisir pantai selatan tersebut memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembaga pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang memiliki sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat wilayah Kabupaten Malang: Gunung Kelud (1.731 mdpl), Gunung Kawi (2.651 mdpl), Gunung Panderman (2.040 mdpl), Gunung Anjasmoro (2.277 mdpl), Gunung Welirang (2.156 mdpl), Gunung Batok (2.868 mdpl), Gunung Semeru (3.676 mdpl), dan Pegunungan Kendeng (600 mdpl). Kondisi topografis yang seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, di antaranya Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan

terpanjang di Jawa Timur. Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1°C hingga 26,6°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71°C hingga 89°C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2mm hingga 780mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni dan tertinggi pada bulan Desember.

Struktur penggunaan lahan meliputi: pemukiman/kawasan terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering 23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,1%; padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/rusak 1,5%; tambang galian 0,3%; lain-lain 3,2%. Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman, dan hutan.

c. Aspek Demografi

Kabupaten Malang dengan luas wilayah 3.535 km² memiliki jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.576.596 jiwa pada tahun 2017 yang tersebar di 33 kecamatan, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.295.017 jiwa dan perempuan 1.281.579 jiwa. Lebih jelasnya bagaimana kondisi kependudukan

atau demografi yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2017
dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Malang berdasarkan
Jenis Kelamin pada Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Donomulyo	31.601	31.026	62.627
2	Kalipare	30.060	30.120	60.180
3	Pagak	22.537	23.203	45.740
4	Bantur	34.564	34.327	68.891
5	Gedangan	27.228	25.904	53.132
6	Sumbermanjing	46.065	44.210	90.275
7	Dampit	59.628	59.293	118.921
8	Tirtoyudo	30.742	30.134	60.876
9	Ampelgading	26.540	25.886	52.426
10	Poncokusumo	46.887	45.920	92.797
11	Wajak	40.905	40.142	81.047
12	Turen	57.758	56.940	114.698
13	Bululawang	35.875	36.049	71.924
14	Gondanglegi	42.597	42.949	85.546
15	Pagelaran	33.975	33.656	67.631
16	Kepanjen	53.563	54.392	107.955
17	Sumberpucung	26.897	27.521	53.418
18	Kromengan	18.811	19.376	38.187
19	Ngajum	24.397	24.912	49.309
20	Wonosari	20.271	21.090	41.361
21	Wagir	45.358	44.092	89.450
22	Pakisaji	44.955	45.185	90.140
23	Tajinan	27.146	27.200	54.346
24	Tumpang	37.783	37.822	75.605
25	Pakis	80.969	79.794	160.763
26	Jabung	37.878	36.651	74.529
27	Lawang	55.824	56.020	111.844
28	Singosari	92.245	91.170	183.415
29	Karangploso	42.913	41.909	84.822
30	Dau	39.759	38.101	77.860
31	Pujon	34.941	33.243	68.184
32	Ngantang	28.474	27.944	56.418
33	Kasembon	15.881	15.398	31.279

Sumber: malangkab.go.id

2. Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

a. Visi dan Misi Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Pujon Kidul terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Pujon Kidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1200. mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013-2016. Jarak tempuh Desa Pujon Kidul ke Kota Batu adalah 12,1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit, sedangkan jarak ke Kota Malang adalah 27 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Desa Pujon Kidul memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Pujon Kidul yang GUYUB

RUKUN”

(Gotong Royong, Usaha, Yakin, Ulet, Bertaqwa, Rukun, Kreatif,

Unggul)

Makna dari visi tersebut yaitu:

Untuk mewujudkan masyarakat yang guyub, diperlukan kesadaran untuk gotong royong, sehingga usaha yang dirintis, dengan penuh keyakinan, serta ulet yang dimiliki masing-masing warga, yang berlandaskan taqwa kepada Tuhan YME. Dengan bermodalkan rukun (bersatu), baik rukun antar warga, keluarga, serta pihak Pemerintah Desa yang dibarengi kinerja handal tanpa putus asa. Kreativitas dan kerjasama antara warga juga Pemerintah Desa, mutlak dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita kita bersama menjadikan Desa Pujon Kidul menjadi desa unggul yang selalu berprestasi yang memegang falsafah Jawa: *“Toto, Titi, Tentrem, Kerto tur raharjo”*. *“Baldatun toyyibatun warobbun ghofur”*.

Misi

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (tata kelola pemerintahan yang baik, misalnya pendataan aset desa beserta pemanfaatannya), berkeadilan, dan demokratis (ex: rembuk desa, sebagai landasan musyawarah mufakat);
- 3) Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai;

- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum muda di dalam berperan aktif kegiatan desa;
- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- 6) Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana);
- 7) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa;
- 8) Peningkatan kesejahteraan sosial.

Sumber: pujonkidul.desa.id

Wujud dari misi di atas adalah sebagai berikut:

Misi Pertama

1. Mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama (bertaqwa), melalui kegiatan:
 - 1) Jamaah tahlil, diba', istiqotsah, dan majelis ta'lim.
 - 2) Pengalokasian anggaran dari APBDes untuk jama'ah dan tempat ibadah.
2. Adat istiadat dan budaya, melalui kegiatan:
 - 1) Kuda lumping, pencak silat, bantengan, Hadrah atau terbang jidor, dan kesenian lainnya.
 - 2) Kegiatan selamatan desa sebagai agenda tahunan yang berpotensi sebagai kekuatan ekonomi dan wisata lokal.

Misi Kedua

Mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa (tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan anggaran, pendapatan aset desa, beserta pemanfaatannya agar berkeadilan dan demokratis melalui rembung desa sebagai landasan mufakat). Dilaksanakan melalui program:

- 1) Tertib administrasi pemerintahan desa (semua keputusan dan surat menyurat harus diarsip);
- 2) Pelayanan prima dan cepat (pelayanan pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Tanah). Maksimal 15 hari sudah selesai;
- 3) Pelayanan surat menyurat dilaksanakan secara terpadu di Balai Desa, kecuali yang bersifat mendadak;
- 4) Pengelolaan keuangan (ADD, DD, dan PAD) serta aset desa yang transparan dan akuntabel;
- 5) Memaksimalkan peran Pemerintah Desa serta lembaga di tingkatan desa (LPMD, perangkat desa RT/RW, Karang Taruna, BPD) agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Perumusan dan penetapan peraturan desa (peraturan desa tentang pengelolaan aset desa yang dibutuhkan);
- 7) Memberikan insentif kepada RT/RW sesuai dengan ketentuan;
- 8) Menyelenggarakan rembung desa minimal satu tahun sekali;

- 9) Mengalokasikan sebagian dari pengelolaan tanah kas desa untuk Linmas, RT/RW, dan Karang Taruna.

Misi Ketiga

Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Hal tersebut diwujudkan dengan cara meningkatkan peran linmas, toga, tomas, dan pemuda dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Misi Keempat

Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, terutama memberi kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum muda di dalam berperan aktif kegiatan desa (unggul dan kreatif). Hal tersebut diwujudkan dengan cara:

- 1) Peningkatan kualitas SDM dan keterampilan pemuda yang dibiayai melalui APBDesa;
- 2) Pembinaan olahraga dan pengembangan bakat;
- 3) Melibatkan peran pemuda dalam setiap kepanitiaan desa, baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan lain yang diselenggarakan Pemerintah Desa;
- 4) Memotivasi masyarakat untuk menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun;
- 5) Memperkuat kelembagaan Karang Taruna, sebagai wadah berhimpun generasi muda.

Misi Kelima

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, melalui program kegiatan: menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait (dinas pertanian, peternakan, serta perguruan tinggi) guna memanfaatkan potensi SDA desa.

Misi Keenam

Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana), melalui kegiatan:

- 1) Perencanaan pembangunan dengan memerhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan;
- 3) Pembangunan sarana drainase dan selokan (pola kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten);
- 4) Jalan lingkungan (pola kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten);
- 5) Penyediaan sarana perbaikan jalan rutin;
- 6) Perbaikan sarana irigasi (kemitraan dan proyek pemerintahan daerah dan provinsi);

Misi Ketujuh

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa, meliputi: meningkatkan peran aktif kaum perempuan melalui kegiatan posyandu dan dasa wisma.

Misi Kedelapan

Peningkatan kesejahteraan sosial, meliputi:

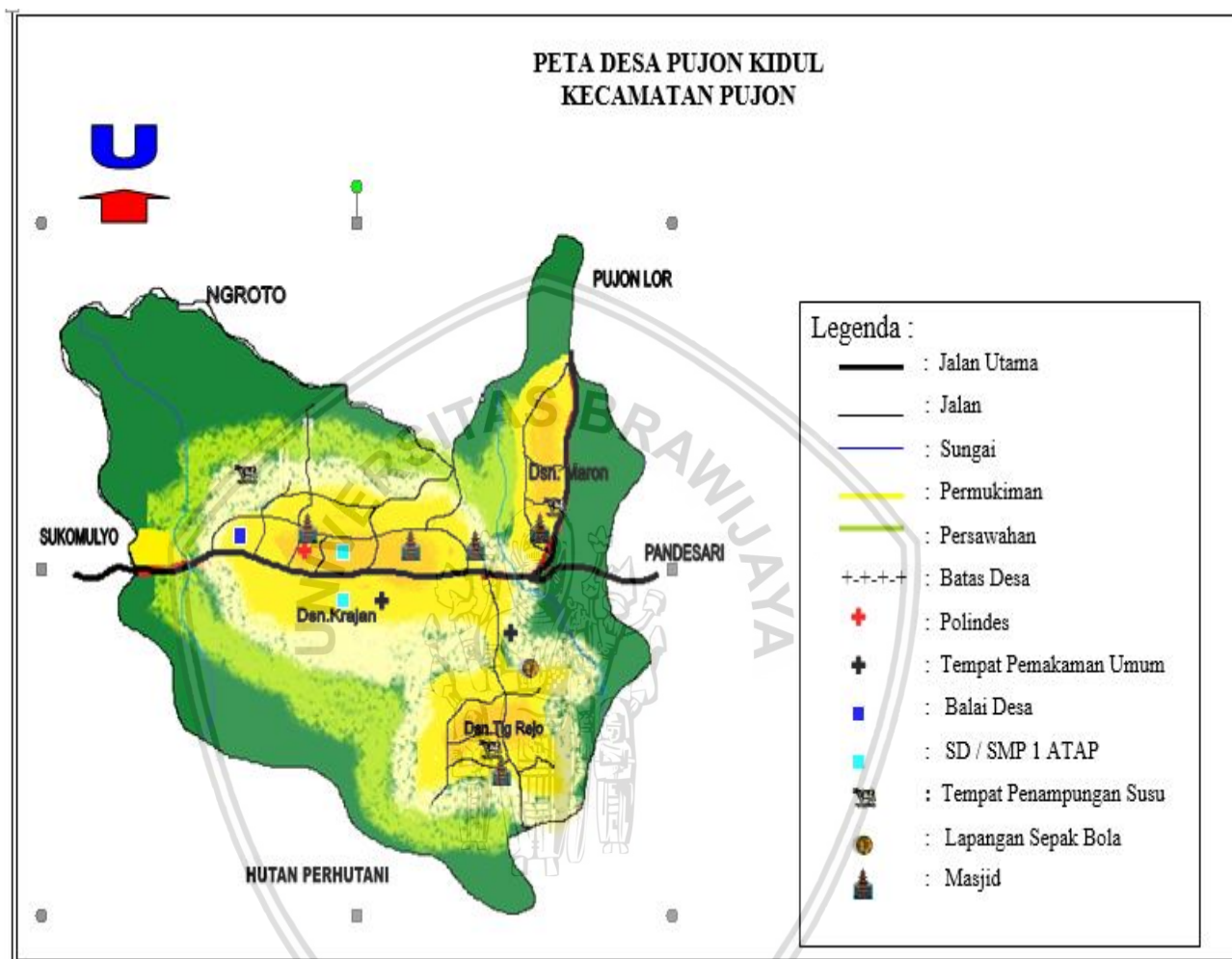
- 1) Santunan kepada keluarga kurang mampu, baik berupa bantuan atau modal kerja;
- 2) Bedah rumah bagi keluarga kurang mampu;
- 3) Memberikan alokasi dana APBDes melalui beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu;
- 4) Memfasilitasi pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

b. Wilayah Administratif

Secara administratif, Desa Pujon Kidul adalah salah satu desa di Kecamatan Pujon yang ada di wilayah barat Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Jarak tempuh Desa Pujon Kidul ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 37 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Adapun batas-batas wilayah Desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut:

Utara	: Desa Pujon Lor
Timur	: Desa Pujon Lor
Selatan	: Hutan Perhutani
Barat	: Desa Sukomulyo

Desa Pujon Kidul pada kondisi tersebut dapat digambarkan pada peta sebagai berikut:



Gambar 8. Peta Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Tabel 3. Tingkat Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan Tanah	Luas
1	Sangat subur	56 Ha
2	Subur	140 Ha
3	Sedang	1.109 Ha
4	Tidak subur/kritis	233 Ha

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Berdasarkan data di atas, Desa Pujon Kidul memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih luas daripada tanah yang tidak subur. Hal tersebut menjadikan masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani yang lahan pertaniannya ditanami berbagai macam tanaman tergantung musim dan cuaca, seperti tomat, cabai, kubis, wortel, kentang, dan lain sebagainya. Lahan yang tidak subur dijadikan sebagai pemukiman dan pemakaman masyarakat Pujon Kidul.

Desa Pujon Kidul dengan kondisi geografis seperti yang telah dijelaskan di atas memiliki luas wilayah sebesar 330.000 Ha. Pembagian wilayah Desa Pujon Kidul tersebut terdiri dari lahan produktif yang digunakan masyarakat sebagai area bercocok tanam dan pemukiman, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pemetakan Lahan Produktif

No.	Pemetakan Lahan Produktif	Luas
1	Pemukiman	24.9 Ha
2	Pertanian	87 Ha
3	Tegal/Kebun	240 Ha
4	Hutan Produksi	578 Ha
5	Sekolah	0,4 Ha
6	Olahraga	0,5 Ha
7	Pemakaman Umum	0,5 Ha

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Berdasarkan tabel 4 dapat digambarkan bahwa yang paling dominan adalah hutan produksi. Kedua diduduki oleh lahan perkebunan dan yang ketiga adalah pertanian, yang sesuai dengan rata-rata pekerjaan masyarakat Pujon Kidul yaitu sebagai petani.

Wilayah Desa Pujon Kidul secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti, jagung serta tanaman buah seperti apel, tomat, wortel juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman kayu-kayuan merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam Desa Pujon Kidul ini menjadi bagus sebagai lahan pertanian jiwa penduduk.

c. Kependudukan atau Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Pujon Kidul pada tahun 2017, jumlah penduduk Desa Pujon Kidul adalah 4.451 jiwa, dengan rincian 2.286 laki-laki dan 2.178 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.343 KK. Tingkat kemiskinan di Desa Pujon Kidul sudah cukup mereda. Dari jumlah 1.343 KK, sejumlah 488 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 89 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 247 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 487 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 19 KK sebagai sejahtera III plus. Jika 488 KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 8,5% KK Desa Pujon Kidul adalah keluarga miskin.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pujon Kidul dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu sektor pertanian dan peternakan, jasa/perdagangan dan lain-lain. Berikut dijabarkan dalam tabel mengenai macam-macam pekerjaan masyarakat Desa Pujon Kidul:

Tabel 5. Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlah

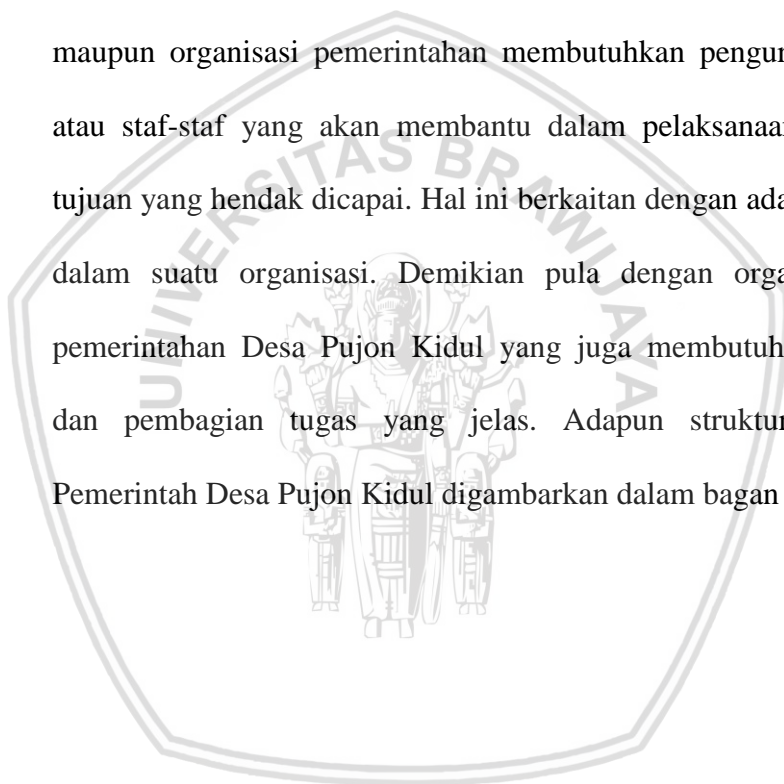
No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1.833 orang
2	Jasa/Perdagangan: 1) Jasa Pemerintahan 2) Jasa Perdagangan 3) Jasa Angkutan 4) Jasa Keterampilan 5) Jasa lainnya	19 orang 26 orang 16 orang 8 orang 21 orang
3	Sektor Peternakan	1.714 orang
4	Sektor lain	16 orang
Jumlah		3.653 orang

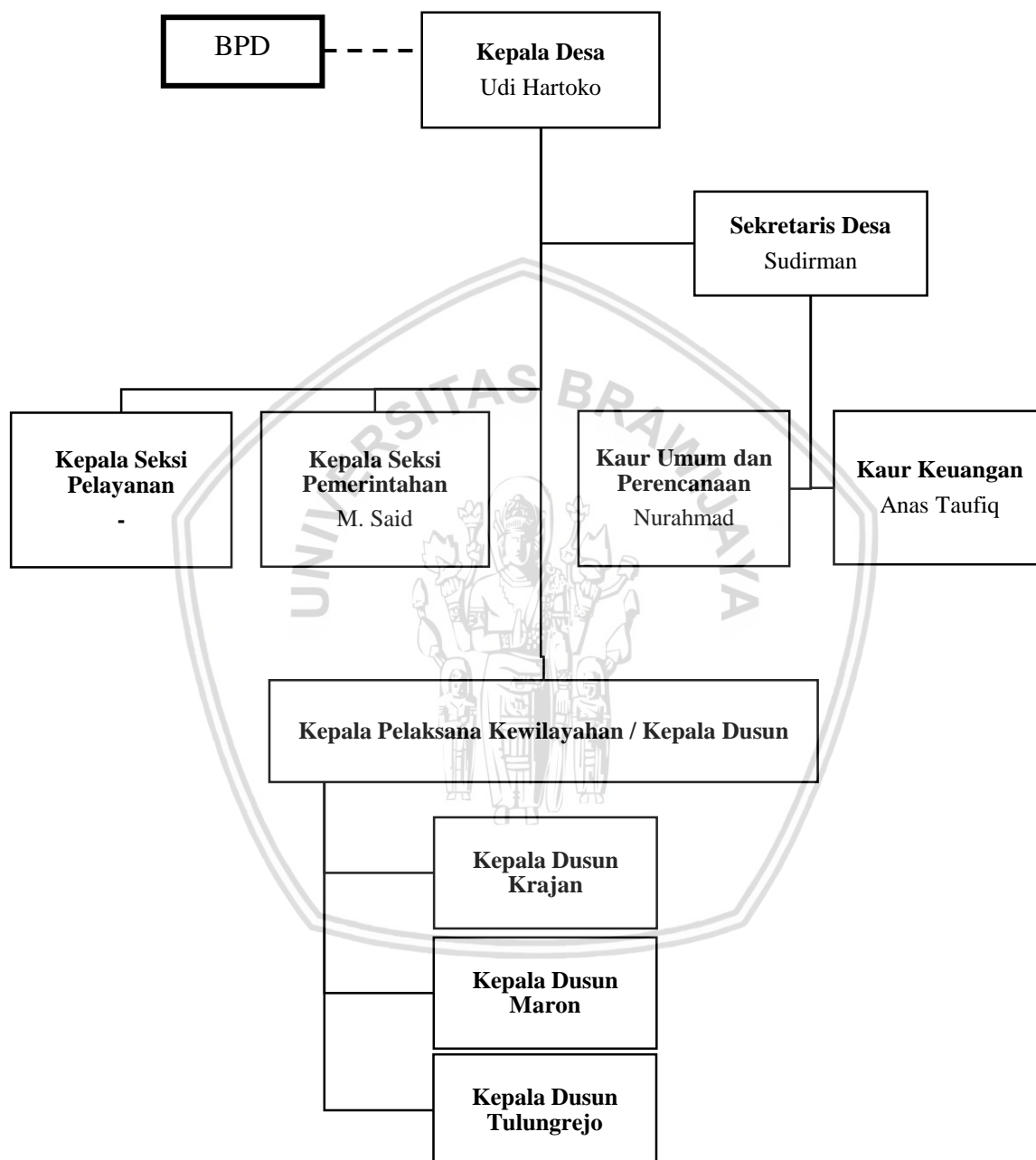
Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Pada tabel 5 disebutkan bahwa pekerjaan utama masyarakat Pujon Kidul adalah di bidang pertanian yang berjumlah 1.833 orang dari total penduduk 4.146 orang. Urutan kedua terbesar pada sektor peternakan dengan total 1.714 orang. Kedudukan ketiga terdapat jasa dan perdagangan yang meliputi jasa pemerintahan, jasa perdagangan, jasa angkutan, jasa keterampilan, dan jasa lainnya dengan total 90 serta sektor lainnya berjumlah 16 orang. Saat ini, status kemajuan dan kemandirian Desa Pujon Kidul menurut Indeks Desa Membangun (IDM) sudah masuk ke dalam kategori Desa Swakarya atau Desa Berkembang.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pujon Kidul

Sebuah desa dalam menjalankan mengelola pemerintahannya memiliki tiga kategori kelembagaan desa, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, yaitu terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan membutuhkan pengurus-pengurus atau staf-staf yang akan membantu dalam pelaksanaan tugas dan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berkaitan dengan adanya struktur dalam suatu organisasi. Demikian pula dengan organisasi pada pemerintahan Desa Pujon Kidul yang juga membutuhkan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Pujon Kidul digambarkan dalam bagan berikut ini:



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)**Desa Pujon Kidul**

**Gambar 9. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)
Desa Pujon Kidul**

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Kepala Desa Pujon Kidul dalam menyelenggarakan pemerintahan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian membagikan tugas atau perintahnya kepada Sekretaris Desa yang kemudian akan dilimpahkan kepada Kaur (Kepala Urusan), yang terdiri dari Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kasi (Kepala Seksi) yang terdiri dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan dan Pelatihan. Sementara itu, Kepala Desa dapat langsung memberikan perintah atau tugas kepada Kepala Dusun (Kasun) untuk melaksanakan suatu tugas yang berhubungan dengan kegiatan di lingkungan masyarakat. Kepala Dusun pada Desa Pujon Kidul ini terdiri dari tiga Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun Krajan, Kepala Dusun Maron, dan Kepala Dusun Tulungrejo. Kepala Dusun biasanya akan memberikan komando atau arahan kepada RT/RW setempat untuk menggerakkan warganya dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Berikut dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Desa

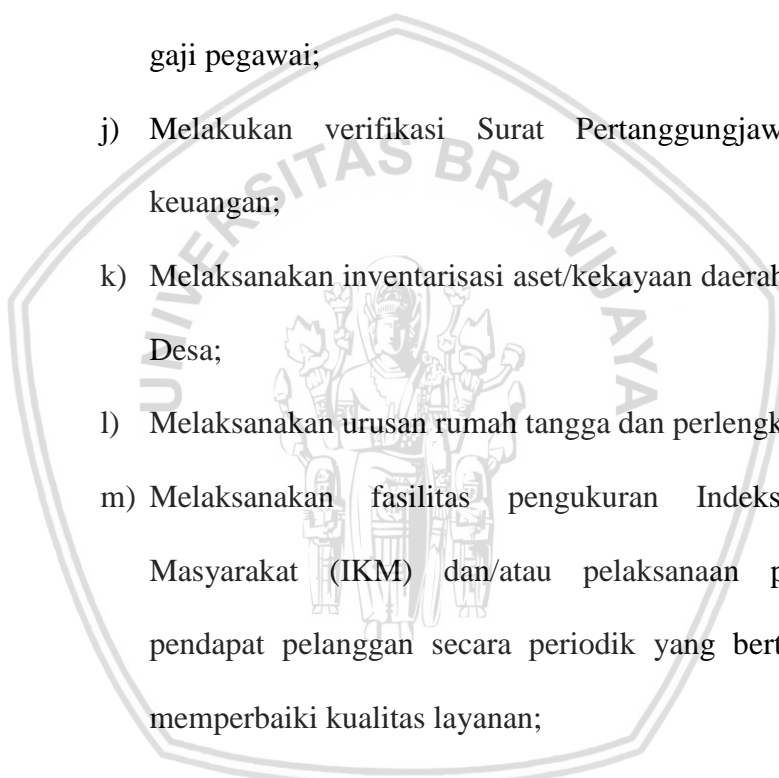
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, yaitu mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kepastakaan serta kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b) Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c) Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
- d) Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e) Melakukan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;

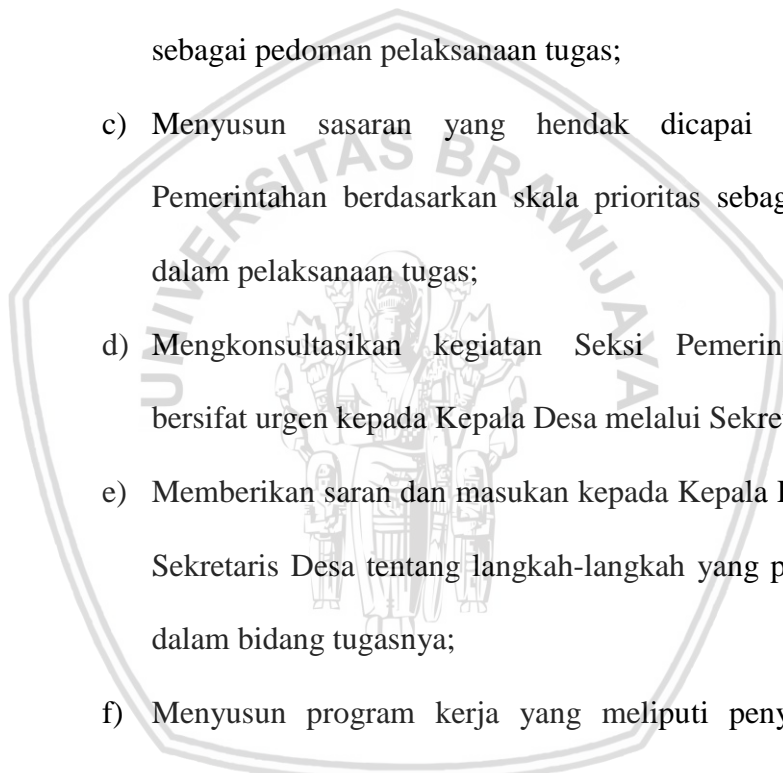
- f) Melakukan urusan kehumasan, keprotokolan, dan keputakaan;
- g) Melaksanakan kegiatan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h) Mengelola anggaran dan retribusi;
- i) Melakukan kegiatan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j) Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- k) Melaksanakan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Desa;
- l) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m) Melaksanakan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n) Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website*;
- o) Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.



3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti, dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pemerintahan yang bersifat urgen kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- e) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan bidang pertanahan, dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- g) Mempersiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h) Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;



- i) Melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan desa;
- j) Menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah;
- k) Melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta ketenagakerjaan;
- l) Melaksanakan pendataan mengenai Angkatan Tenaga Kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja;
- m) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah desa;
- n) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan masalah pertanahan;
- o) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- p) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- q) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;

- c) Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi;
- e) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

5) Urusan Umum dan Perencanaan

- a) Melakukan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Program Kerja Desa bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- b) Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c) Melakukan inventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- d) Melakukan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum desa;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan desa;
- f) Melakukan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;

- g) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pembangunan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i) Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan desa lingkup tugas pemerintahan dan pelayanan umum;
- j) Menyusun bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di desa;
- k) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

6) Urusan Keuangan

- a) Menyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai bidang tugasnya;
- b) Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pada penanggung jawab kegiatan;
- c) Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada penanggung jawab kegiatan.

7) Kepala Dusun

Kepala Dusun dalam menjalankan pemerintahan desa memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Dusun sebagai perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b) Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Setelah mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Pemerintah Desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDes, serta lembaga kemasyarakatan di Desa Pujon Kidul dalam menjalankan tugasnya. Berikut dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari BPD, BUMDes, dan lembaga kemasyarakatan di Desa Pujon Kidul:

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Kepala Desa, yang memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- a) Melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya;
- d) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e) Membuka lapangan pekerjaan;
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa;
- g) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes; dan

- h) Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan menggerakkan pembangunan. LPMD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b) Menanamkan dan memupukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d) Melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

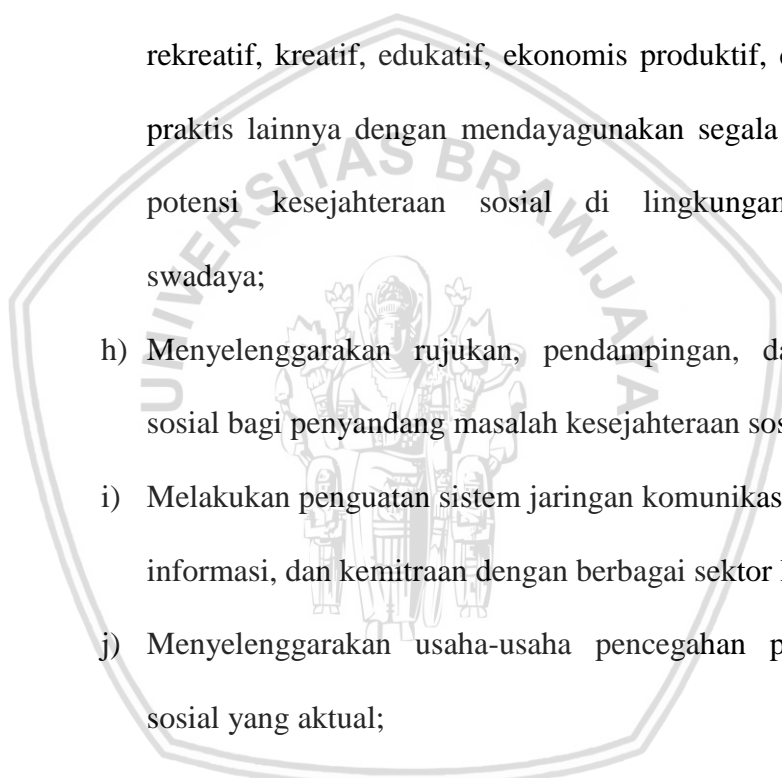
- e) Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f) Melakukan penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

4) Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi oleh generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
- d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e) Melakukan penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab sosial generasi muda;

- f) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) Melakukan pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h) Menyelenggarakan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i) Melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j) Menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k) Melaksanakan kegiatan pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l) Melakukan kegiatan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.



B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pujon Kidul

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar yang kemudian disebut dengan Dana Desa. Dana Desa adalah salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Program Dana Desa ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah menegaskan bahwa pengakuan negara atas desa terhadap kewenangannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa harus diikuti dengan pemberian sumber daya kepada desa agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana tersebut merupakan dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu bagian dari kelompok transfer, yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 mengenai kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). Prioritas penggunaan Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.



+62 812-3258-1056 (Kades)
Desa Pujon Kidul Kec. Pujon Kab.Malang 65391
Senin - Sabtu 8.00 - 15.00

HOME
PROFIL
ANGGARAN
BERITA
BUMDESA
GALLERY

BLOG

DESA WISATA PUJON KIDUL > BLOG > PEMERINTAHAN > APBDES 2017

APBDES 2017

Mei 31, 2017 Posted by: anas taufik Category: Pemerintahan 2 Komentar



URAIAN	ANGGARAN	
PENDAPATAN	(Rp)	Sumber
Pendapatan Asli Desa	85.000.000,00	PAD
Restribusi Sampah	10.000.000,00	
cafe Sawah	75.000.000,00	
Pendapatan Transfer	1.379.073.919,00	
Dana Desa	831.968.000,00	DDS
Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	25.021.419,00	PBH
Alokasi Dana Desa	490.967.000,00	ADD
Bantuan Keuangan	31.117.500,00	
Bantuan Kabupaten	31.117.500,00	PBK
Pendapatan Lain-lain	31.500.000,00	
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (surplus PNPm)	31.500.000,00	DLL
JUMLAH PENDAPATAN	1.495.573.919,00	

Gambar 10. Pendapatan Desa Pujon Kidul APBDes 2017
 Sumber: pujonkidul.desa.id/2017/05/31/apbdes-2017

Cari ...

POS-POS TERBARU

[VALIDASI DATA PENDUDUK](#)
[PENGUATAN JEJARING WISATA BROMO TENGGER SEMERU](#)
[KUNJUNGAN KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DESA DAN TRANSMIGRASI](#)
[PENILAIAN COMMUNITY BASED TOURISM \(CBT\) DESA WISATA TINGKAT NASIONAL](#)
[SOSIALISASI PERDES TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN USAHA WISATA, ATRAKSI WISATA SERTA KEGIATAN PENUNJANG WISATA LAINNYA YANG ADA DI WILAYAH DESA WISATA PUJONKIDUL](#)

KOMENTAR TERBARU

Yayan Baharidzky pada [PEMBINAAN BUMDES SUMBER SEJAHTERA](#)
anas taufik pada [APBDES 2017](#)
nageldesign blumen pada [APBDES 2017](#)

ARSIP

- OKTOBER 2017
- SEPTEMBER 2017
- AGUSTUS 2017

B E L A N J A		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	490.869.500,00	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	222.384.000,00	ADD
Operasional Perkantoran	139.268.000,00	ADD
Operasional BPD	23.000.000,00	ADD
Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga	33.600.000,00	ADD
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	11.250.000,00	ADD
perencanaan pembangunan	6.000.000,00	ADD
Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Akhir	2.000.000,00	ADD
Pemilihan Kepala Desa	31.117.500,00	PBK
Pemilihan Kepala Desa	22.250.000,00	ADD
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	285.385.000,00	
Drainase cor RT 04/02	27.860.000,00	DDS
Peninggian TPT RT 08/02	3.150.000,00	DDS
Penerangan Jalan RT 15/08	3.560.000,00	DDS
Rabat Beton RT 18/09	58.840.000,00	DDS
Rabat beton RT 11	24.855.000,00	DDS
Rabat Beton RT 10/05	16.215.000,00	DDS
Drainase cor RT 06/03	74.975.000,00	DDS
Drainase cor RT 03/02	61.225.000,00	DDS
TPT RT 02	14.705.000,00	DDS
Piat Beton RT 07	2.570.000,00	DDS
Rehab Gedung PKK	8.260.000,00	DDS
Jamban dan Plesterisasi	21.150.000,00	DDS
Keramik Gedung PAUD	8.720.000,00	DDS
TPT sawah Krajan (tower)	13.970.000,00	DDS
TPT 1 Paket sawah Krajan (bawah)	22.395.000,00	DDS
Rabat cuci sepeda (Karang taruna)	4.125.000,00	DDS
Pengembangan Desa Wisata	150.960.000,00	DDS
TPT (parkiran)	8.270.000,00	PAD
Petunjuk Arah/Rambu rambu	7.840.000,00	DLL
Pemeliharaan Taman	8.500.000,00	PBH
Pelestarian Lingkungan Hidup	99.966.750,00	DDS
Bidang Pembinaan Masyarakat	146.450.000,00	
Keamanan dan Ketertiban	20.000.000,00	ADD
PKK	38.950.000,00	ADD
Bantuan Operasional Ketua kelompok SPP (Eks PNM)	7.000.000,00	DLL
Pelestarian Seni Budaya dan adat istiadat	73.100.000,00	PAD
Keagamaan	7.400.000,00	PBH
Bidang Pemberdayaan	201.046.677,00	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	10.625.000,00	PBH
Kesehatan Masyarakat	53.330.000,00	DDS
Bantuan Berobat (yang tidak di cafer JKN)	4.280.000,00	DLL
Insentif Guru TK	5.400.000,00	DDS
Pendistribusian Raskin	3.500.000,00	DDS
Pengelolaan Informasi dan komunikasi	7.500.000,00	DDS
Pengolahan hasil produksi	3.500.000,00	PAD
TPST	103.296.000,00	DDS
Profil Desa	4.875.000,00	DDS
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	4.740.677,00	PBH
Jumlah Belanja	1.481.882.927,00	
SURPLUS / DEFISIT	13.690.992,00	
P E M B I A Y A A N		
Penerimaan Pembiayaan	36.309.008,00	
SILPA Tahun 2016	36.309.008,00	
JUMLAH	36.309.008,00	
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa	50.000.000,00	DDS
Jumlah Pembiayaan	13.690.992,00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

Gambar 11. Belanja Desa Pujon Kidul APBDes 2017

Sumber: pujonkidul.desa.id/2017/05/31/apbdes-2017

Program Dana Desa sendiri sudah berjalan mulai dari tahun 2015 hingga saat ini tahun 2017. Desa Pujon Kidul telah menerima bantuan Dana Desa mulai dari tahun 2015 hingga saat ini 2017. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa Desa yang dikategorikan menurut Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai Desa Swakarya atau Desa Berkembang ini pada tahun 2017 telah menerima Dana Desa sebesar Rp. 831.968.000. Dalam perencanaan APBDes Desa Pujon Kidul pada tahun 2017, Dana Desa (DDS) digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta permodalan BUMDes. Hal tersebut telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang mengatur penggunaan Dana Desa. Berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Pujon Kidul menggunakan Alokasi Dana Desa sepenuhnya untuk kegiatan pemerintahan desa, dan beberapa untuk membiayai keamanan dan ketertiban serta PKK.

Implementasi program memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah terkait permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan implementasi suatu program. Sehubungan dengan hal tersebut, Grindle (1980) sebagaimana dikutip oleh Agustino (2012) menyarankan untuk memperhatikan dua isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: 1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang terdiri dari; kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan,

pelaksana program, dan sumber-sumber daya yang digunakan. 2) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) yang terdiri dari; kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Berikut adalah penjelasan terkait *Content of Policy* dan *Context of Implementation*, serta hasil kebijakan mengenai implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul dalam rangka pembangunan desa.

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Dasar Hukum yang Digunakan dalam Implementasi Program Dana Desa

Sebuah program akan dapat berjalan apabila memiliki dasar hukum yang menjadi landasan dari program tersebut. Program Dana Desa dilaksanakan atau dijalankan berdasarkan beberapa dasar hukum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes di Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Undang-Undang Desa itu kan awalnya ada mulai dari Era Pak Jokowi ya. Nah semenjak itu lah mulai ada program Dana Desa yang dibuat oleh Kemendes. Penggunaan dari Dana Desa ini juga sudah diatur dalam Permendes ya mbak, mulai dari penggunaan untuk pembangunan fisik di desa hingga penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa.” (Wawancara pada 5

April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa program Dana Desa ini merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2014. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Desa ini tertuang dalam dasar hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- i) Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

2) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa (*Interest Affected*)

Variabel ini memandang bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan atau *interest affected*, dalam hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Hal inilah yang kemudian ingin diketahui lebih lanjut sebagaimana menurut Grindle (dalam Agustino, 2012). Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan merupakan satu poin penting yang

perlu untuk ditinjau lebih lanjut lagi guna mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan merupakan salah satu poin penting yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut lagi guna mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini dapat dilihat dari kegiatan perumusan penggunaan Dana Desa. Berikut adalah kutipan wawancara bersama dengan narasumber Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan dari Desa Pujon Kidul:

“Perencanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam musyawarah desa. Kita melakukan jaring aspirasi masyarakat. Jadi, aspirasi masyarakat itu ada yang kita selesaikan dengan anggaran dan ada penyelesaian hanya dengan pembinaan semacam pendekatan. Gak semuanya itu diselesaikan dengan anggaran. Jadi, tahapannya untuk penggunaan anggaran itu adalah kita dipencermatan RPJMDesa. Setelah pencermatan di RPJMDesa, kita menentukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam satu tahun ini kegiatan apa sajakah yang ditentukan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini termasuk perangkat desa, Kepala Desa, dan masyarakat. Semua kegiatan dimasukkan ke dalam RKP. Tahapan selanjutnya kita menentukan kegiatan yang dianggarkan dari APBDDes. APBDDes itu sumbernya dari DD, ADD, bagi hasil pajak, dan PAD. Visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul itu sendiri adalah ‘Desa Wisata: Menuju Desa Wisata yang Mandiri dan Maju’. Arah pembangunannya memprioritaskan ke sana. Semua lini, mulai dari pembinaan, pemberdayaan, sampai infrastrukturnya mengarah ke sana. Parameternya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan mengenai kepentingan yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa juga turut disampaikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti sebagai berikut:

“Perumusan penggunaan Dana Desa biasanya menggunakan prioritas melalui musyawarah desa. Melalui musyawarah itu banyak masukan-masukan dari masyarakat, yang artinya bukan kepentingan satu dua orang saja, melainkan banyak orang. BUMDes juga merupakan salah satu prioritas karena dananya itu nggak bakal hilang. Katakanlah untuk simpan pinjam, untuk UMKM, dana itu kan bisa diputar dan bisa berdampak untuk jangka panjang. Jadi selain BUMDes, desa wisata juga merupakan salah satu prioritas karena sesuai dengan visi pembangunan dari Kepala Desa sendiri yaitu desa wisata. Dengan desa wisata, banyak orang masuk, banyak orang keluar uang untuk desa kita, nah otomatis juga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini dipengaruhi oleh beberapa kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi dalam penggunaan Dana Desa yaitu menjalankan visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menjadikan Desa Pujon Kidul sebagai destinasi wisata alam, yaitu desa wisata. Segala aspek kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata, yang secara langsung juga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul itu sendiri.

Kepentingan lainnya yang memengaruhi penggunaan Dana Desa adalah BUMDes. Sesuai dengan visi pembangunan Kepala Desa yang ingin menjadikan Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata, BUMDes juga diharapkan dapat membantu proses pencapaian Desa Pujon Kidul untuk menjadi desa wisata yang semakin maju melalui program-programnya, yaitu dengan membantu masyarakat desa agar menjadi masyarakat yang mandiri dalam perekonomiannya. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam, UMKM, maupun pengadaan lapangan pekerjaan yang mendukung pergerakan di sektor wisata. Melalui hal tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang memengaruhi penggunaan Dana Desa yaitu visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul itu sendiri sebagai desa wisata, serta BUMDes sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa yang berkesinambungan juga dengan visi pembangunan Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata. Aspek pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat desa diarahkan demi kemajuan desa wisata Desa

Pujon Kidul, yang bertujuan untuk pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

3) Manfaat dari Adanya Dana Desa

Manfaat merupakan poin kedua yang terdapat pada *content of policy*. Variabel ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus mempunyai beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif, yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang telah dilaksanakan. Adanya program Dana Desa pada tiap desa di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa ini tentunya mempunyai manfaat dalam pelaksanaannya. Program tersebut dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pasti mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima dari Dana Desa tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul, yang menyatakan:

“Manfaat dari adanya Dana Desa ini sangat besar. Banyak program yang dulu menjadi impian kita sebenarnya namun tertahan karna keterbatasan dana. Semenjak adanya Dana Desa di tahun 2015 dan masyarakat juga proaktif, ya gayung bersambut, lah. Dari Dana Desa, kita sudah membangun jaringan pipanisasi air bersih, yang sudah ada *masterplan*-nya. Lalu juga ada penampungan untuk air bersih, yang akan berdampak untuk 40 tahun ke depan. Kemudian ada pengelolaan sampah terpadu. Selanjutnya pembangunan jalan di masing-masing titik di dusun kita, baik itu skala kecil maupun besar. Di samping itu, untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sudah kita lakukan melalui program makanan tambahan bayi, kemudian kegiatan posyandu lansia.”

(Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)



Gambar 12. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Manfaat dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan:

“Manfaat yang didapat dari adanya Dana Desa ini yang jelas kalau untuk infrastruktur, sarana dan prasarana kita menjadi semakin lebih baik. Akses ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga semakin baik, seperti pembangunan jalur ekonomi, saluran air, air bersih, jamban, serta pembangunan sarana prasarana desa wisata. Terus secara pemberdayaan, pembangunan kita adalah pembangunan produktif, yang hasil kegiatan itu adalah sebagai membuka lapangan kerja dan sebagai tambahan nilai ekonomi untuk masyarakat tersebut. Kegiatan-kegiatan fisiknya itu bukan kegiatan yang habis dikerjakan hanya bermanfaat untuk akses jalan atau apa itu, tapi kegiatan yang produktif. Hasil kegiatan pembangunan fisik tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung juga ada, di antaranya ada pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta

peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan juga dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Itulah yang dilakukan di desa kita.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)



Gambar 13. Kegiatan pembangunan drainase Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul



Gambar 14. Kegiatan pemberdayaan wanita di Kantor Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Selanjutnya dalam hal ini manfaat dari adanya Dana Desa menurut Bapak Prayitno selaku Kepala BUMDes Pujon Kidul menyatakan bahwa:

“Manfaat dari adanya Dana Desa bisa membuka usaha-usaha yang awalnya tidak ada modal, dengan adanya Dana Desa, nah BUMDes bisa jalan. Usaha-usahanya sekarang sudah banyak, seperti air bersih, seperti UMKM, nah itu, dan juga kalau UMKM kita juga kasih pinjaman. Karna kalau mau melakukan pinjaman ke bank itu harus melalui surat sertifikat. Namun karna warga desa nggak punya, maka warga desa bisa pinjam di BUMDes hanya dengan menggunakan unsur kepercayaan saja. Itu untuk mempermudah akses UMKM. Kalau pembangunan infrastruktur kan yang merencanakan, yang memprioritaskan mana yang dibangun itu kan masyarakat sendiri, sehingga tidak ada pengaruh dari orang lain. Yang bekerja dipembangunannya itu juga masyarakat desanya sendiri, jadi masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan. Jadinya sekarang mereka yang memprioritaskan sendiri, mereka juga yang membangun.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Manfaat dari adanya Dana Desa tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, melainkan dirasakan juga oleh para pemuda di Desa Pujon Kidul ini. Manfaat dari adanya Dana Desa ini dijelaskan Mas Firli selaku pemuda Karang Taruna dan bagian dari POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), yaitu kumpulan pemuda dari Desa Pujon Kidul yang bekerja di Desa Wisata Pujon Kidul. Mas Firli berpendapat bahwa manfaat dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini adalah sebagai berikut:

“Manfaatnya Dana Desa sangat banyak sekali, sangat membantu untuk kebutuhan masyarakat desa. Jadi dengan adanya Dana Desa, makanya bisa ada Cafe Sawah. Manfaat yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk para pemuda dan meringankan angka kemiskinan. Seperti kita sekarang bagian dari POKDARWIS yang bekerja untuk Desa Wisata Pujon Kidul.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)



Gambar 15. Cafe Sawah Desa Pujon Kidul

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 16. Pemuda POKDARWIS yang bekerja di Cafe Sawah

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

Pendapat mengenai manfaat adanya Dana Desa ini juga didukung oleh pernyataan dari pemuda Desa Pujon Kidul yang bekerja dalam POKDARWIS, yaitu Mas Ilham yang menyatakan bahwa:

“Manfaatnya Dana Desa itu kebutuhan rumah tangga jadi terpenuhi. Dulunya kan seperti contoh air di sini kan nggak merata walaupun mata air di sini besar banget. Tapi dengan adanya Dana Desa dapat dialokasikan untuk pembuatan tandon air dan berdampak untuk 40 tahun ke depan. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk 40 tahun ke depan tuh udah gak akan ada masalah untuk air. Dan untuk orang yang nggak mampu pun bisa terjangkau karna ada harga 500 rupiah per-meternya, bahkan ada yang diberikan secara gratis. Kalau dulu kan orang harus punya pipa atau ambil sendiri airnya ke gunung, ke mata air. Tapi setelah ada tandon yang alokasinya dari Dana Desa, sekarang lebih dekat.” (Wawancara pada 5 April 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Selain itu juga manfaat dari adanya Dana Desa dapat dilihat dari bagaimana penyerapan dari Dana Desa tersebut melalui Laporan Penyerapan Dana Desa dari Desa Pujon Kidul, serta bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa di lapangannya. Berikut akan ditampilkan Tabel Laporan Penyerapan Dana Desa Pujon Kidul 2017 beserta dengan beberapa foto kegiatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul.



Tabel 6. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Anggaran 2017 Desa Pujonkidul, Kabupaten Malang

Pagu Dana Desa TA 2017
Rp 831.968000

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Capaian Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	10
1	PENDAPATAN							
	<i>Pendapatan Transfer</i>							
	Dana Desa							
	- Tahap Pertama			499,180,000	499,180,000	-	100	
	- Tahap Kedua			332,788,000		332,788,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN			831,968,000	499,180,000	332,788,000	60	
2	BELANJA							
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>							
1.	-							
2	Bidang Pembangunan Desa							
1	Drainase cor RT 04/02	Drainase cor RT 04/02	12,8m3	27,860,000		27,860,000	-	
2	Peninggian TPT RT 08/04	Peninggian TPT RT 08/04	2,1m3	3,150,000		3,150,000	-	
3	Rabat beton RT 18/09	Rabat beton RT 18/09	55,8m3	58,840,000	52,927,591	5,912,409	90	
4	Rabat Beton RT 11	Rabat Beton RT 11	22,5m3	24,855,000	23,336,415	1,518,585	94	
5	Rabat beton RT 10/05	Rabat beton RT 10/05	9,2m3	16,215,000	13,947,550	2,267,450	86	
6	Drainase cor RT 06/03	Drainase cor RT 06/03	33m3	74,975,000		74,975,000	-	

7	Drainase cor RT 03/02	Drainase cor RT 03/02	27,8m3	61,225,000		61,225,000	-	-
8	TPT RT 02/01	TPT RT 02/01	14,5m3	14,705,000		14,705,000	-	100
9	Plat Beton RT 07/04	Plat Beton RT 07/04	1,1m3	2,570,000		2,558,500	11,500	100
10	Rehab Gedung PKK(keramik)	Rehab Gedung PKK (keramik)	1 Paket	8,260,000		7,520,465	739,535	91
11	Plesterissi dan jamban	Plesterissi dan jamban	1 paket	21,150,000		2,000,000	19,150,000	9
12	Keramik Gedung PAUD	Keramik Gedung PAUD	47 m2	8,720,000		8,314,422	405,578	95
13	TPT sawah (Tower)	TPT sawah (Tower)		13,970,000		13,970,000	-	100
14	TPT Sawah, Plat Beton	TPT Sawah, Plat Beton	10m3, 1,32m3	10,935,000		11,272,863	(337,863)	100
15	Makadam sawah	Makadam sawah	20m3/194m2	11,460,000		11,460,000	-	100
16	Rabat tempat Cuci sepeda (karang Taruna)	Rabat tempat Cuci sepeda (karang Taruna)	3,36m3	4,125,000			4,125,000	-
17	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa wisata	1 paket	150,960,000		143,342,100	7,617,900	95
18	Konservasi (sumber Galing)	Konservasi (sumber Galing)	1 paket	99,966,750			99,966,750	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						-	
1.	Kesehatan	Kesehatan	1 tahun	53,330,000		42,555,000	10,775,000	80
2.	Insentif Guru TK	Insentif Guru TK	1 tahun	5,400,000		2,700,000	2,700,000	50
1.	Transport Raskin	Transport Raskin	1 tahun	3,500,000		2,000,000	1,500,000	57
2.	Pengadaan Internet	Pengadaan Internet	1 tahun	7,500,000		598,000	6,902,000	8
1.	Operasional TPST	Operasional TPST	1 tahun	103,296,000		38,600,000	64,696,000	37
2.	Profil	Profil	1 tahun	4,875,000			4,875,000	
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						-	

	-				-
					-
	791,842,750			391,807,906	400,034
					-
					-
					-
					-
					-
					-
1 Tahun	40,125,250			40,125,250	-
					-
				40,125,250	-
	-			67,246,844	

Malang, 201
KEPALA DESA

Malang, 2017
KEPALA DESA

UDI HARTOKO

135



Gambar 17. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT 02/01 Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul



**Gambar 18. Pembangunan jalan (Rabat Beton) di RT 18/09
Desa Pujon Kidul**

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul



Gambar 19. Pembangunan jalan (Rabat Beton) RT 11 Desa Pujon Kidul

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Gambar di atas merupakan tabel Laporan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Pujon Kidul serta beberapa foto bukti kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pujon Kidul yang menggunakan Dana Desa. Kegiatan tersebut di antaranya pembangunan jalan (rabat beton) pada RT 11 dan RT 18 dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) pada RT 02. Pada foto-foto tersebut terlihat bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan pembangunan yang swakelola, yaitu dengan menggunakan tenaga dari masyarakat Desa Pujon Kidul sendiri. Dari gambar tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penyerapan Dana Desa dalam rangka pembangunan desa di Desa Pujon Kidul dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Penyerapan atau penggunaan Dana Desa yang tertera dalam laporan sesuai dengan bukti lapangan dan telah sesuai dengan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Desa yang mengharuskan penggunaannya bersifat swakelola.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Dana Desa ini pasti memiliki manfaat yang diperoleh. Kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan yaitu bahwa manfaat dari adanya Dana Desa dapat dilihat dari segi infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan hal ini dapat dijabarkan bahwa manfaat

dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul dapat dilihat dari segi infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:

a. Infrastruktur desa

Manfaat dari adanya Dana Desa pada aspek ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Pujon Kidul melalui pembangunan produktif, yaitu seperti pembangunan jalan ekonomi, kebutuhan sanitasi masyarakat desa, hingga membuka lapangan pekerjaan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada di kawasan Cafe Sawah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga difokuskan untuk meningkatkan kualitas Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa terhadap Cafe Sawah sebagai destinasi desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata, sehingga semakin mendatangkan banyak orang untuk berwisata di sana, dengan demikian Pemasukan Asli Desa dan masyarakat desa semakin meningkat. Adanya pembangunan dari segi infrastruktur desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pemberdayaan masyarakat desa

Manfaat dari adanya Dana Desa pada aspek ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul, yaitu seperti mengadakan pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, hingga meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui penambahan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari adanya pembangunan infrastruktur dari Desa Pujon Kidul. Manfaat lain dari adanya Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu memudahkan masyarakat untuk memulai UMKM melalui pemberdayaan yang diadakan di desa dan peminjaman di BUMDes yang hanya berlandaskan kepercayaan saja. Selanjutnya, manfaat dari adanya Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa juga dirasakan oleh para pemuda di Desa Pujon Kidul itu sendiri. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Desa Wisata Pujon Kidul seperti di Cafe Sawah, serta pemberdayaan dan pelatihan terhadap pemuda di Desa Pujon Kidul tersebut, kini pemuda-pemuda tersebut sudah tidak menganggur lagi. Para pemuda di Desa Pujon Kidul kini bekerja di Desa Wisata Pujon Kidul, yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Ada yang bekerja di Cafe Sawah, ada juga

yang bekerja sebagai *tour guide* untuk melayani perjalanan wisata di Desa Pujon Kidul. Manfaat yang didapatkan dari pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang mandiri dalam perekonomiannya dan tingkat kesejahteraannya semakin meningkat.

4) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa

Setiap kebijakan maupun program yang telah dibuat pasti memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Program yang dibentuk tidak akan berjalan apabila tidak mempunyai tujuan yang jelas. Pada poin ini akan dijelaskan mengenai sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan maupun program haruslah memiliki skala yang jelas. Derajat perubahan atau target yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa ini menurut Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa di Desa Pujon Kidul ini dinyatakan sebagai berikut:

“Target yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa menurut saya adalah masyarakat sudah tidak lagi membicarakan pembangunan fisik, tetapi sudah ‘saya harus dapat apa dari nilai ekonomi ketika pembangunan ini berjalan di Pujon Kidul?’ Jadi seperti ini, peternakan sapi perah yang dulunya hanya menjual langsung dikirim dalam bentuk belum olahan, sekarang sudah berkembang. Ibu-ibu PKK membuat bermacam-macam olahan yang

nilainya lebih meningkat lagi.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Derajat perubahan atau target yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa ini juga dinyatakan oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Target yang ingin dicapai dengan adanya Dana Desa yaitu mengurangi urbanisasi dengan membuka lapangan pekerjaan, karena banyak masyarakat kita yang bekerja di kota atau di luar desa atau di manapun yang jelas bukan di dalam desa. Tapi dengan adanya Dana Desa, kita membuka lapangan sehingga masyarakat yang maunya bekerja di luar desa atau di kota besar itu tidak jadi, karena usaha di desa sudah membuka lapangan pekerjaan. Lalu juga memfasilitasi pemuda yang tidak memiliki modal untuk bekerja kita fasilitasi dengan bekerja di unit usaha di desa. Daripada bekerja di kota, lebih baik bekerja di tempat sendiri. Salah satunya adalah unit kerja yang ada di wisata, Cafe Sawah, banyak. Kita punya usaha-usaha desa yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mungkin tidak mempunyai modal ijazah, tidak mempunyai keahlian khusus, itu bisa bekerja di desa tanpa mengajukan lamaran.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan mengenai derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa ini juga disampaikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul. Pendapat beliau mengenai derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini adalah sebagai berikut:

“Harapannya ya itu untuk prioritas pemberdayaannya semakin besar. Jadi pembangunan infrastruktur itu ya tetap ada, tapi skalanya bisa dinomorduakan. Dengan meningkatkan melalui BUMDes, nanti hasilnya BUMDes

kan bisa untuk pembangunan infrastruktur. Sementara ini kan persentase pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat masih 60 banding 40 lah. Kalau untuk pembangunan infrastruktur kan nanti uangnya jadi mati, kalau untuk BUMDes kan nanti akan muter lagi uangnya, jadi bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur juga.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Derajat perubahan ingin dicapai dari adanya Dana Desa ini juga dinyatakan oleh Bapak Nurahmad selaku warga Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Perubahan yang diharapkan dari adanya Dana Desa di Pujon Kidul ini sebagai masyarakat Desa Pujon Kidul, kita pun harus ikut aktif dalam pembangunan desa ini. Jangan kita ini hanya cuma menanti uluran tangan saja. Kalau bisa, kita itu harus lebih kreatif, bisa termotivasi apa yang bisa kita berikan demi kemajuan desa kita.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 14.00 WIB di rumah Bapak Nurahmad, Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan beberapa narasumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini ada beberapa hal. Pertama yaitu menurunkan angka urbanisasi. Selama ini urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pujon Kidul ini dilakukan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di desa. Masyarakat lebih memilih untuk mencari pekerjaan di luar desa maupun di kota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Adanya Dana Desa ini diharapkan dapat menurunkan angka

urbanisasi di Desa Pujon Kidul dikarenakan semakin meningkatnya lapangan pekerjaan di desa.

Derajat perubahan kedua yang diharapkan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini adalah berubahnya *mindset* atau pola pikir. Masyarakat desa yang awalnya hanya melihat Dana Desa dari pembangunan fisik saja, kini diharapkan untuk dapat melihat nilai ekonomi apa yang harus mereka dapatkan dari adanya pembangunan fisik di Desa Pujon Kidul ini. Masyarakat desa diharapkan dapat termotivasi untuk kreatif dan aktif dalam memajukan desa ini serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tidak hanya berpangku tangan dan mengharapkan bantuan saja.

Derajat perubahan ketiga yang diharapkan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini adalah sudah bisa meningkatkan presentase prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui BUMDes. Selama ini presentase prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat masih di bawah presentase penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Target yang ingin dicapai ke depannya yaitu agar penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan apabila prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui

BUMDes, maka dana tersebut akan tetap berputar dan bisa digunakan juga untuk pembangunan infrastruktur di desa.

5) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa

Pada poin ini menjelaskan mengenai letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul, sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Desa Pujon Kidul, menyatakan bahwa:

“Yang jelas semua aspirasi masyarakat kita tampung. Untuk menentukan kebijakan, kita menggunakan skala prioritas. Parameternya sesuai dengan budaya dan lokal yang ada. Berarti prioritas di desa kita dengan prioritas di desa tetangga itu tidak sama, sesuai dengan potensi dan masalah yang ada di desa kita.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)



Gambar 20. Musyawarah desa dalam rangka merumuskan RPJMDes

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Anas Taufiq juga diperjelas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, sebagaimana yang terdapat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti yaitu sebagai berikut:

“Jadi kalau pembangunan infrastruktur itu awalnya dilakukan pendataan, istilahnya pemetaan, pendataan mana saja yang mau dibangun baik fisik maupun non-fisik. Setelah dicatat nanti ya ada ratusan, ya nanti akan dipilih mana yang akan didahulukan. Nanti akan tercatat dalam RPJMDesa. Semua potensi pembangunan yang harus dibangun tercatat di sana. Hingga mana saja yang didahulukan itu proses rapatnya cuman itu. Keputusan terakhir itu dari kesepakatan dengan masyarakat. Dalam rapat desa, perwakilan masyarakat dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat, lembaga di tingkatan desa, dan tokoh agama, kita ber-30 orang.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa ini dilakukan dengan cara musyawarah antara Pemerintah Desa dengan perwakilan masyarakat dalam rapat desa (Musyawarah Desa). Dalam rapat desa tersebut dilakukan kegiatan pendataan kebutuhan apa saja yang diinginkan di desa tersebut melalui jaring aspirasi. Setelah itu dimusyawarahkan mana saja yang harus diutamakan atau diprioritaskan dan dicatat dalam RPJMDesa. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa tersebut sangat dibutuhkan adanya kolaborasi antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa.

6) Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Pelaksanaan program selalu melibatkan beberapa aktor agar terciptanya program yang dapat berjalan dengan baik. Program harus dilaksanakan dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan mengetahui wewenang atau tugas masing-masing yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini menurut Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Desa Pujon Kidul menyatakan bahwa:

“Penggunaan anggaran itu pelakunya ada beberapa lapisan atau beberapa penanggung jawab. Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran. Sekretaris desa sebagai verifikator kegiatan. Bendahara sebagai penatausahaan di administrasi, dibantu oleh tiga Kasi (Kepala Seksi). Ada tiga kasi. Kasi di pemerintahan itu bertanggung jawab di pembelanjaan pemerintahan, mengkoordinir pembelanjaan di pemerintahan. Kasi di pembangunan bertanggung jawab di pembangunan secara fisik atau infrastruktur. Yang ketiga adalah Kasi pemberdayaan dan pembinaan, bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Siapa yang melaksanakan kegiatan di lapangan atau eksekutor adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Pengawas dan pelaksana adalah TPK, dipenggunaan anggaran. Pengawas ada masyarakat, Kasi, Pemerintah Desa, dan pemerintah di atas Pemerintah Desa. Pengawas dari Pemerintah Desa diwakilkan oleh Kepala Seksi pelaksana dari masing-masing bidang. Untuk transparansi kita publikasikan anggaran melalui ruang terbuka, informasi-informasi, dan juga melalui *website*. Jadi seperti itu bentuk transparansinya. Setiap moment-moment tertentu kita sampaikan tentang penggunaan anggaran.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berikut mengenai bentuk-bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul:

LAPORAN RPJM DESA PUJONKIDUL

CARI BERDASARKAN RT

Cari RPJM Per RT

Show 10 entries

Search:

No	bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Dikerjakan Tahun	Jumlah	Sumber	Pola	Aksi
1	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	Plat beton	MARON RT13 RW7	1 paket	2018,	10,000,000	apbdes, APBD	Swakelola,	<div></div> <div></div>
2	Pembangunan Desa	Saluran Air Di Pemukiman	Pemb gorong2	MARON RT13 RW7	6M3	2019,	12,000,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
3	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	Rabat beton	MARON RT12 RW7	250x2,5x0,12 m/75M3	2020,	86,250,000	APBD II	Swakelola,	<div></div> <div></div>
4	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	Makadam/telford	MARON RT12 RW7	150x2 m/300M2	2022,	37,500,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
5	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	Makadam bahu jalan	MARON RT12 RW7	367,5M2	2020,	45,950,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
6	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	Rabat beton	MARON RT12 RW7	130x1,7x0,10 m/22,1M3	2019,	25,414,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
7	Pembangunan Desa	Jalan Lingkungan	TPT	MARON RT12 RW7	300 m (1,3x0,35)/136,5M3	2021,	122,850,000	APBD II	Swakelola,	<div></div> <div></div>
8	Pembangunan Desa	Saluran Air Di Pemukiman	Drainase	MARON RT12 RW7	80 m (50x50)/48M3	2019,	43,200,000	APBD II	Swakelola,	<div></div> <div></div>
9	Pembangunan Desa	Bangunan Sosial	Paving	MARON RT12 RW7	40x2 m/80M2	2020,	7,200,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
10	Pembangunan Desa	Bangunan Sosial	Pemb aula dan tempat wudhu	MARON RT12 RW7	2 UNIT	2022,	20,000,000	APBDes	Swakelola,	<div></div> <div></div>
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Dikerjakan Tahun	Jumlah	Sumber	Pola	Aksi

Showing 1 to 10 of 254 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

26

Next

Gambar 21. Transparansi RPJM Desa melalui website Desa Pujon Kidul
Sumber: sie.pujonkidul.desa.id/rpjmdesa.php

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

Pernyataan selanjutnya turut disampaikan oleh pihak pelaksana program Dana Desa yaitu Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti sebagai berikut:

“Kalau pembangunan fisik kan sudah ada tupoksinya. Kalau pembangunan fisik itu ada LPMD, ada BUMDes, kemudian ada ibu PKK, kemudian ada untuk pemuda itu Karang Taruna, serta Pemerintah Desa dan masyarakat. Tapi kalau untuk yang bagian usaha, yang pemuda seperti POKDARWIS itu masuknya ke dalam BUMDes.”
(Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berikut adalah daftar tabel mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, yaitu:

Tabel 7. Daftar Pejabat Pemerintah Desa Pujon Kidul

No.	Nama	Jabatan
1	Udi Hartoko	Kepala Desa
2	Sudirman	Sekretaris Desa
3	Nurahmad	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Anas Taufiq	Kaur Keuangan
5	M. Said	Kasi Pemerintahan
6	Ahmad Imam	Kepala Dusun Dukuh Krajan
7	Suhartono	Kepala Dusun Maron
8	Kusnin	Kepala Dusun Tulungrejo

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Tabel 8. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pujon Kidul

No.	Nama	Jabatan
1	H. Choirul Anam	Ketua
2	Kholiq	Sekretaris
3	Ali Muktar	Bendahara
4	Suyanto	Anggota
5	Musofah	Anggota

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Tabel 9. Daftar Anggota LPMD Desa Pujon Kidul

No.	Nama	Jabatan
1	Subandi	Ketua I
2	H. Miskan	Ketua II
3	Muslimin	Sekretaris
4	H. Suheri	Bendahara
5	Ismanu	Anggota
6	Mulyono	Anggota
7	Sugianto	Anggota
8	Janib	Anggota
9	Samsul Hadi	Anggota

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Tabel 10. Daftar Anggota BUMDes Desa Pujon Kidul

No.	Nama	Jabatan
1	Prayitno	Ketua
2	Mahfud Fauzi	Sekretaris
3	Kiptiyah	Bendahara
4	Sampurno	Divisi Air Minum
5	Mahfud Fauzi	Divisi Laku Pandai
6	Samsul Hadi	Divisi Wisata
7	Surahman	Divisi TPST
8	Sugito	Divisi Pertanian

Sumber: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pujon Kidul

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa ini yaitu terdiri dari Pemerintah Desa, LPMD, BUMDes beserta POKDARWIS, BPD, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan masyarakat Desa Pujon Kidul. Kepala Desa sebagai pemegang kuasa dalam penggunaan anggaran, dibantu oleh Sekretaris Desa yang bertugas sebagai verifikator kegiatan. Bendahara sebagai penatausahaan di bagian administrasi, dibantu oleh tiga Kasi (Kepala Seksi). Tiga kasi yang bertanggung jawab, yaitu Kasi di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembelanjaan untuk pemerintahan desa serta mengkoordinir pembelanjaan untuk pemerintahan desa. Kasi di bagian pembangunan bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan secara fisik atau infrastruktur. Ketiga adalah Kasi pemberdayaan

dan pembinaan, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Lalu yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan di lapangan atau eksekutor adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Selain itu, TPK juga bertugas sebagai pengawas dalam penggunaan anggaran. Pengawas penggunaan Dana Desa juga diawasi oleh masyarakat, Kasi, Pemerintah Desa, dan pemerintah di atas Pemerintah Desa. Pengawasan dari Pemerintah Desa diwakilkan oleh Kepala Seksi pelaksana dari masing-masing bidang. Untuk transparansi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan publikasi anggaran melalui ruang terbuka, informasi-informasi, dan juga melalui *website* Desa Pujon Kidul, serta setiap moment-moment tertentu akan sampaikan mengenai penggunaan anggaran. BUMDes bertugas untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dengan memberikan pinjaman untuk UMKM serta pemberdayaan pemuda desa yang terbentuk dalam POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

7) Sumber Daya yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam menangani kebutuhan secara efektif. Sumber daya finansial adalah terkait dengan anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya alam merupakan berbagai hasil alam yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan. Pelaksanaan program Dana Desa dalam rangka pembangunan desa di Desa Pujon Kidul ini membutuhkan sumber daya, di antaranya sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana yang disampaikan narasumber dari Kaur Keuangan Desa Pujon Kidul Bapak Anas Taufiq dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

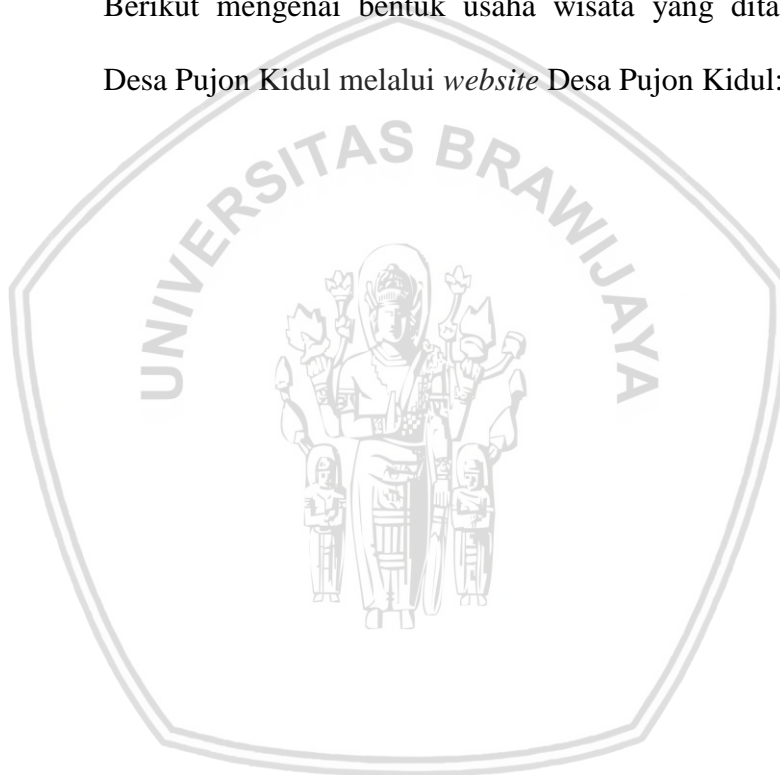
“Untuk sumber daya yang kita gunakan dalam pembangunan infrastruktur, yang jelas sumber daya yang kita gunakan adalah sumber daya manusianya, itu pasti. Kita tidak mempunyai sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan material. Kita mendatangkan dari luar daerah. Untuk pemberdayaan masyarakatnya juga sama, sumber daya yang kita gunakan adalah sumber daya manusianya.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak pelaksana di atas, juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes, yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti sebagai berikut:

“Sumber daya itu kan ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam ya disesuaikan dengan potensi alam, dalam hal ini wisata itu tadi, seperti Cafe Sawah. Alamnya mendukung, suhu segar, itu potensi yang ada dari desa kita yang kita manfaatkan. Kalo sumber daya manusia, ya kita sesuaikan dengan kapasitasnya. Seperti kalau ada pos pembangunan air bersih, ya kita cari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Semuanya orang desa Pujon Kidul kita maksimalkan. Seperti tadi sampeyan ke sana (Kantor Kepala Desa) tadi ada penerima tamu, itu kita menggunakan pemuda-pemuda, nah itu di bawah saya (BUMDes). Mereka bertugas menerima tamu, mengantar tamu, yang tadi pakai seragam merah-hitam, nah itu termasuk sumber daya manusia dari kita. Walaupun gak sehebat di luaran, tapi kita manfaatkan. Dengan sedikit-sedikit belajar nanti lama-lama juga bisa. Mungkin kalau belum bisa ya kita adakan pelatihan. Jadi orientasinya kalau Dana Desa ada hubungannya dengan wisata itu memang bisa menyerap tenaga kerja. Kalau secara sumber daya di desa kita, memang untuk pendidikan itu masih rendah. Kalau kerja ke luar gak pake ijazah kan tidak bisa. Tapi kalau desa kita yang buat usaha, kita pakai masyarakat kita yang hanya lulusan SMP itu saja sudah bisa siap kerja. BUMDes itu kan menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa bekerja nanti hanya masyarakat kita, kalau ke kota mungkin sudah tidak bisa bersaing. Kedua, yaitu mungkin ada yang sekolah. Nah itu akan kita kasih fasilitas seperti teman-teman tadi yang pakai merah-hitam ada yang masih sambil kuliah juga. Nah nanti di waktu kosongnya kita coba berdayakan. Kita bentuk tim LIVE IN. Tadi ada tuh tamu dari Sumatera, jadi mau menginap selama dua hari. Menginapnya di rumah warga (*homestay*). Jadi dengan adanya tamu, nanti warga yang rumahnya dijadikan tempat menginap akan dapat uang juga, yang pemuda yang mengantar-antar tadi itu juga akan mendapatkan uang. Kalau BUMDes itu kan sudah pikirannya bisnis, jadi potensi apa yang masuk

diusahakan menghasilkan uang. Nanti tamu yang datang itu sudah kita paketkan berapa per-orang, sampai *rundown* acaranya pun sudah kita siapkan. Jadi, tim yang mengurus mendapat uang, warga yang rumahnya dijadikan *homestay* juga mendapatkan uang, acara makan di Cafe Sawah pun warga akan mendapatkan uang juga.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berikut mengenai bentuk usaha wisata yang ditawarkan oleh Desa Pujon Kidul melalui *website* Desa Pujon Kidul:





Gambar 23. Penjualan Pelayanan Wisata Desa Pujon Kidul melalui website
Sumber: sie.pujonkidul.desa.id

Selanjutnya menurut Mas Ilham selaku pemuda Desa Pujon Kidul yang tergabung dalam POKDARWIS menjelaskan mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini, yaitu sebagai berikut:

“Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Dana Desa ini ya sumber daya alam dan manusia. Dua-duanya saling berkesinambungan dan sama-sama digali. Kalau untuk contoh SDM itu seperti Mas Fidi, kan ahlinya di bidang potret atau video. Daripada desa itu mendatangkan orang yang ahlinya untuk bikin video profil desa, mending bikin sendiri, kan ada Mas Fidi. Daripada dananya buat keluar, mending dananya buat masyarakat sendiri, langsung dirasakan masyarakatnya sendiri. Bahkan ada yang ahli lain, seperti di sini ada yang buat kincir air gitu, satu kincir sudah bisa mengairi sekitar 12 rumah. Jadi potensi sumber daya manusia itu yang dikembangkan.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berikut merupakan video profil desa yang dibuat dengan memanfaatkan tenaga pemuda dari Desa Pujon Kidul, yang dimuat dalam *website* Desa Pujon Kidul.



Gambar 24. Kumpulan video profil Desa Pujon Kidul melalui *website* desa
Sumber: sie.pujonkidul.desa.id/videopujonkidul.php

Sesuai dengan pernyataan dari wawancara narasumber di atas mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Dana Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Pujon Kidul memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dalam memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk membangun desanya. Dengan memanfaatkan kondisi lingkungan alam Desa Pujon Kidul yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam, maka penggunaan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kualitas desa sebagai daerah destinasi wisata yang dapat memberikan pemasukan bagi desa itu sendiri. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga dimaksimalkan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa Pujon Kidul. Adanya daerah destinasi wisata di Desa Pujon Kidul seperti misalnya Cafe Sawah maupun paket wisata lainnya dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, kapasitas dari masyarakat desa pun dituntut untuk semakin meningkat agar kualitas dari desa wisata tersebut menjadi meningkat. Oleh karena itu, masyarakat desa diberdayakan, baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa, maupun peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di desa.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)**1) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa**

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasi suatu program, maka dibutuhkan suatu strategi untuk digunakan. Pelaksanaan pembangunan desa menggunakan bantuan Dana Desa ini pastinya memerlukan strategi yang digunakan agar tujuan-tujuan dari program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi yang diterapkan terkait dengan penggunaan Dana Desa dalam rangka pembangunan desa ini menurut Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul agar mencapai tujuan yang diharapkan, dijelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk strategi penggunaan Dana Desa sendiri kita menggunakan skala prioritas. Tiap desa punya prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Karena prioritas dari Desa Pujon Kidul ini adalah desa wisata, maka kegiatan pembangunannya, pemberdayaannya, serta pembinaannya pun mengarah ke sana.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Anas Taufiq di atas juga turut didukung dengan pendapat dari Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti sebagai berikut:

“Strateginya ya itu, kalau pembangunan fisik sudah jelas dengan menggunakan skala prioritas. Salah satunya itu akses jalan yang secara ekonomi membantu masyarakat, seperti jalan usaha tani, itu diutamakan agar aksesnya menjadi lebih lancar. Seperti selokan juga diutamakan untuk persiapan ketika musim hujan. Tapi kalau untuk non-fisik, kita sesuaikan dengan prioritas dan potensi desa, seperti wisata, UMKM juga, yang semuanya itu berkaitan dengan wisata. Dengan banyaknya orang datang, UMKM-nya otomatis akan laku juga. Jadi semuanya saling berkesinambungan.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber di atas, maka dapat dijelaskan bahwa strategi yang digunakan para pelaksana dari program Dana Desa dalam penggunaan Dana Desa yaitu Dana Desa digunakan sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas dari penggunaan Dana Desa tersebut di antaranya jalan ekonomi, desa wisata, serta yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

2) Tanggapan yang Diberikan oleh Aktor yang Terlibat dalam Program Dana Desa

Adanya suatu program pasti akan menimbulkan tanggapan dari penerima program. Akan ada banyak tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul mengenai tanggapan yang

diberikan oleh anggota pelaksana program Dana Desa di Desa

Pujon Kidul:

“Ya memang itu tergantung dari Pemerintah Desanya, satu desa itu tergantung dari Pemerintah Desanya, mau sosialisasi ke masyarakat seperti apa supaya masyarakat tahu. Tapi dengan asas musyawarah itu tadi, jadi masyarakat tahu bahwa Dana Desa itu memang dampaknya luar biasa. Mungkin sampeyan kalau ke sini beberapa tahun yang lalu, sudah lain secara fisik, dilihat itu saja. Katakanlah di Pujon ini ada sepuluh desa, semuanya sama ya kan dapat Dana Desa, tapi kenapa kok lain dari segi kemajuan desanya? Berarti respon untuk melaksanakannya itu lebih tanggap. Masyarakat di sini pun ikut aktif dalam proses pembangunan desa karena mereka sudah mengetahui bagaimana Dana Desa itu digunakan dan apa dampaknya untuk jangka panjang.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Selanjutnya menurut Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul berpendapat mengenai tanggapan para pelaksana program Dana Desa di Pujon Kidul, yaitu sebagai berikut:

“Dana Desa itu sudah ada di Desa Pujon Kidul sejak tahun 2015. Tanggapan dari para pelaksana, terutama masyarakat sangat mendukung. Kita selalu adakan sosialisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu ke mana saja dana tersebut digunakan. Masyarakat Desa Pujon Kidul juga aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan. Ya pokoknya kita semua sangat merasakan dampak dari adanya Dana Desa.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.30 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan mengenai tanggapan para pelaksana mengenai program Dana Desa juga disampaikan oleh Mas Fidi selaku pemuda Desa Pujon Kidul yang juga merupakan bagian dari POKDARWIS, berpendapat mengenai tanggapan para pelaksana program Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

“Tanggapan dari masyarakat Desa Pujon Kidul sudah bagus, mbak. Masyarakat di sini aktif dalam memajukan desa ini, dari pembangunan infrastruktur desa sampai pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, desa kita bisa mencapai cita-cita yang selama ini kita harapkan dan masyarakat menjadi senang karna bisa mendapat pekerjaan di desa sendiri, terutama kami sebagai pemuda di desa juga merasa senang karna dengan adanya Dana Desa telah memberikan kami lapangan pekerjaan. Pemerintah Desa menurut saya juga sudah bagus dalam menjalankan tugasnya. Sosialisasi penggunaan Dana Desa juga sudah diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bagaimana Dana Desa tersebut digunakan dan apa manfaatnya untuk jangka panjang.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari pelaksana program Dana Desa mengenai adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul, mulai dari Pemerintah Desa hingga masyarakat desa sudah cukup baik. Pemerintah Desa dan masyarakat saling aktif berkolaborasi dalam melaksanakan program Dana Desa untuk pembangunan desa.

c. Hasil Kebijakan

1) Dampak dari Adanya Dana Desa

Program Dana Desa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang baik untuk penerima program tersebut. Program Dana Desa ini sendiri mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dengan adanya perubahan, suatu program diharapkan mampu memberikan dampak terhadap penerima dari program tersebut. Dampak yang diberikan oleh suatu program dapat terdiri dari dampak yang terlihat atau yang disebut dengan *output*, maupun dampak yang tidak terlihat atau yang dapat disebut dengan *outcome*. Program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini juga memberikan dampak kepada Desa Pujon Kidul itu sendiri dalam rangka pembangunan desa. Dampak ini dirasakan oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan:

“Dampak dari adanya Dana Desa di desa kita ini yaitu akses ekonomi menjadi semakin baik, lalu banyaknya pemuda Desa Pujon Kidul yang sudah mendapatkan kerja di unit usaha desa. Berkurangnya urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa, terutama pemuda juga salah satu dampak dari adanya Dana Desa. Saluran air dan sarana prasarana seperti jalan ekonomi di desa yang lebih baik juga merupakan dampak dari adanya Dana Desa.”
(Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dampak dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul juga dirasakan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Dampaknya ya secara ekonomi sudah terasa, artinya peluang-peluang yang ada di desa dalam hal lapangan pekerjaan itu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Seperti tadi, pemuda banyak yang bekerja di desa itu dikarenakan adanya Dana Desa. Kalau dahulu belum ada Dana Desa, ya belum ada seperti itu. BUMDes sendiri sebelum ada Dana Desa itu ya ada, cuman kayak papan nama saja. Tapi dengan adanya Undang-Undang Desa, beberapa poinnya itu sangat memprioritaskan BUMDes. Jadi saat ini BUMDes sangat terasa menjadi lebih bergairah.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Selanjutnya menurut Mas Fidi selaku pemuda dari Desa Pujon Kidul yang ikut dalam POKDARWIS, dampak dari adanya Dana Desa di Pujon Kidul adalah sebagai berikut:

“Dana Desa itu dampaknya sangat besar untuk desa kita, karna sangat membantu warga desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini, banyak masyarakat yang mendapat pekerjaan, tingkat urbanisasi semakin berkurang, infrastruktur seperti jalanan untuk perekonomian jadi makin baik. Ya semakin sejahtera lah pokoknya.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak terlihat (*output*) dan dampak tidak terlihat (*outcome*). Penjelasan mengenai *output* dan *outcome* dari dampak adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu sebagai berikut:

a) Dampak Terlihat (*Output*)

Dalam pelaksanaan sebuah program, tentunya akan menghasilkan dampak, baik dampak yang terlihat (*output*) maupun dampak yang tidak terlihat (*outcome*). *Output* merupakan dampak yang dapat terlihat atau dilihat secara nyata oleh pelaksana dan penerima Dana Desa. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai dampak dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul, terdapat dampak terlihat (*output*) yang dihasilkan. *Output* yang dihasilkan yaitu sebagai berikut: 1) Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa, 2) Akses ekonomi yang semakin baik, 3) Adanya lapangan pekerjaan di desa untuk masyarakat Desa Pujon Kidul.

b) Dampak Tidak Terlihat (*Outcome*)

Selain dampak terlihat (*output*), ada juga dampak yang tidak terlihat (*outcome*) yang dapat dirasakan oleh pelaksana dan penerima Dana Desa. *Outcome* merupakan dampak yang tidak dapat langsung dilihat oleh pelaksana program, yang sifatnya berjangka panjang. *Outcome* yang dihasilkan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu sebagai berikut: 1) Menurunnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pujon Kidul, 2)

Meningkatnya kapasitas dari SDM di Desa Pujon Kidul, 3) Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, 4) BUMDes menjadi lebih bergairah.

2) Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya Dana Desa

Suatu program dibentuk agar mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan yang baik dapat diartikan dengan bertambah baiknya keadaan masyarakat dari sebelum ada program dengan sesudah adanya program tersebut dilaksanakan. Perubahan yang lebih baik ini menjadi indikator program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Program Dana Desa ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengenai program Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Pujon Kidul ini diterima dengan baik oleh pelaksana dari program tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yaitu sebagai berikut:

“Selama ini sebelum adanya Dana Desa, desa kan sudah mendapat dana lain seperti ADD. Nah ADD ini kan gak langsung turun ke desa seperti DD yah, suka ada yang ‘nyangkut’ gitu mbak. Jadi kalau mau membangun apa-apa itu sulit. Tapi sekarang dengan adanya Dana Desa ini sudah memperlancar pembangunan yang ada di Desa Pujon Kidul. Jalan perekonomian kini sudah lancar juga sehingga meningkatkan proses perekonomian warga.

Dengan adanya Dana Desa, desa kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk pemuda-pemuda desa kita, sehingga bisa mengurangi urbanisasi di desa kita. Adanya lapangan pekerjaan di desa kita sendiri inilah yang membuat berkurangnya tingkat urbanisasi di desa kita karena masyarakat sudah tidak perlu mencari pekerjaan di luar desa.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pendapat dari Bapak Prayitno mengenai perubahan dengan adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul juga diteruskan oleh pendapat dari Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan dalam wawancara bersama peneliti yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya Dana Desa, yang selama ini awalnya desa kita kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, kini sekarang jadi lebih mudah. Pembangunan infrastruktur di desa kita ini sekarang sudah ada *masterplan*-nya yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Perubahan yang sudah dirasakan juga seperti berkurangnya tingkat urbanisasi di desa ini dikarenakan sudah adanya lapangan kerja di desa sendiri. Para pemuda di sini yang awalnya menganggur, sekarang semua sudah kita manfaatkan untuk bekerja di unit desa. Adanya BUMDes juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaannya dan peminjaman modal untuk UMKM.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Perubahan dari adanya Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul ini dapat dirasakan dari segi pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan manusianya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perubahan yang dirasakan dari adanya Dana Desa di mulai dari meningkatnya sarana dan

prasarana desa melalui pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan sesuai *masterplan* dari Desa Pujon Kidul, yang memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, dari segi pemberdayaan manusia juga sudah dirasakan perubahannya oleh masyarakat. Kini kapasitas masyarakat desa telah meningkat karena adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan kemudahan untuk masyarakat dalam membuat UMKM melalui pinjaman dari BUMDes. Selain dari pendapat di atas, Mas Ilham selaku pemuda Desa Pujon Kidul dan bagian dari POKDARWIS juga menyatakan pendapatnya mengenai perubahan yang dirasakan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul. Berikut pernyataannya dalam wawancara bersama peneliti:

“Wah banyak mbak perubahannya. Dahulu desa kami sebelum menerima Dana Desa tuh enggak seperti ini. Karna adanya Dana Desa, Cafe Sawah bisa dibentuk dan dari Cafe Sawah ini bisa jadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sini. Perubahan yang paling terasa itu ya pemuda-pemuda sini yang tadinya menganggur, kini sudah punya pekerjaan seperti kami di sini. Trus juga untuk pembangunan infrastruktur ada perubahannya seperti saluran air dan pembangunan-pembangunan yang lainnya, yang itu juga sudah ada *masterplan*-nya. Dari kegiatan pembangunan infrastruktur di desa itu juga kan harus pakai tenaga warga desa, nah itu juga dijadikan sebagai lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat. Untuk pemberdayaannya sendiri dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk masyarakat desa, masyarakat di sini menjadi lebih terampil. Seperti kami POKDARWIS ini juga sudah diberikan pelatihan.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan yang dirasakan oleh para pelaksana program Dana Desa. Perubahan yang dirasakan tersebut di antaranya: peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Pujon Kidul yang sudah ada *masterplan*-nya seperti pembangunan saluran air, perbaikan jalan perekonomian, hingga pembangunan Cafe Sawah, hingga dari segi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan dan pemberian lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang membuat pelaksanaan atau pengimplementasian dari adanya program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program Dana Desa berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengungkapkan bahwa ada faktor yang mendukung terjadinya pelaksanaan program Dana Desa, yaitu: 1) Kepala Desa Pujon Kidul yang visioner, 2) Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program. Penjelasan secara rinci terkait dengan

wawancara atau pencarian informasi yang peneliti laksanakan yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Desa Pujon Kidul yang visioner

Program Dana Desa diharapkan mampu berjalan dengan baik karena adanya pemimpin yang mengatur bagaimana program tersebut berjalan. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi dapat dilaksanakan apabila memiliki pemimpin yang visioner. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukung yang membuat perkembangan desa menjadi cepat itu Pemerintah Desanya. Kalau dikerucutkan lagi ya Kepala Desanya. Ya secara pandangan, secara kebijakan sudah lebih luas. Secara memandang desa untuk ke depannya itu *mindset*-nya sudah lebih luas. Itu pengaruh juga. Jadi, ada BUMDes, ada Kepala Desa, itu gak bisa jalan sendiri-sendiri. BUMDes sendiri mau jualan tapi kalau Kepala Desanya kurang *support* ya juga kurang secepat itu perkembangannya. Katakanlah BUMDes mengajukan dana untuk pemberdayaan masyarakat nanti dan Kepala Desanya tidak setuju, ya gak bisa jalan juga. Harus sama-sama satu visi. Kan setelah diusulkan kegiatan yang ingin didanai dengan Dana Desa, kan Kepala Desa juga yang menandatangani dan menyetujui.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Mas Ilham selaku pemuda Desa Pujon Kidul yang tergabung dalam POKDARWIS tentang faktor pendukung dari penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa di Desa Pujon Kidul:

“Menurut saya, salah satu faktor pendukungnya itu adalah desa kita memiliki Kepala Desa yang mengerti potensi dari desa ini. Karena visi dari desa ini sendiri yaitu sebagai desa wisata, makanya semua arah pembangunan dan pemberdayaannya diarahkan ke sana. Pembangunan infrastrukturnya pun juga sudah ada *masterplan*-nya. Oleh karena itu peran dari Kepala Desa juga sangat penting dalam rangka memajukan pembangunan desa.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Dana Desa ini adalah Kepala Desa yang visioner, yang mengerti potensi dari Desa Pujon Kidul dan bagaimana merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

2) Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program Dana Desa

Program Dana Desa diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut. Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana di dalam penggunaan Dana Desa merupakan faktor pendukung yang juga dianggap penting dalam pelaksanaannya. Adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan lembaga masyarakat dan masyarakat desa dalam penggunaan Dana Desa ini dinyatakan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yaitu sebagai berikut:

“Selain dari faktor Kepala Desa yang visioner, ada juga faktor sinergi antar Pemerintah Desa dengan masyarakat. Selama ini sinerginya baik-baik saja, baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya. Kepala Desa selalu berusaha memastikan agar setiap pelaku menjalankan tupoksinya dengan baik, baik itu Pemerintah Desa maupun masyarakat sendiri. Masyarakat sini juga

ikut proaktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam rangka pembangunan desa. Jadi ya sama-sama lah mbak.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul mengenai faktor pendukung dari pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul, yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya kalau menurut saya adalah adanya sinergitas antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan desa, maupun dengan masyarakat. Peran lembaga di tingkatan desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa sebagai tim untuk menyampaikan informasi mengenai informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Masyarakat ikut aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan, dan ikut mengawasi penggunaan dari Dana Desa ini. Kepala Desa selalu mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan tupoksinya dan Pemerintah Desa juga selalu menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui cara normatif seperti pertemuan rapat, maupun yang tidak normatif. Dalam hal ini Pemerintah Desa ingin mengubah *mindset* masyarakat yang selalu berharap mendapatkan dampak langsung dari Dana Desa. Dari masyarakatnya pun juga ikut aktif karena sudah mengetahui bagaimana Dana Desa itu digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara pada 8 Maret, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini ialah adanya sinergitas antara Kepala Desa dengan jajarannya beserta

masyarakat dalam membangun Desa Pujon Kidul. Masyarakat desa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan penggunaan Dana Desa yang dikarenakan adanya dampak dari Pemerintah Desa dalam hal penyelarasan informasi mengenai bagaimana penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa dalam menjalankan tupoksinya juga diawasi oleh Kepala Desa, lembaga di tingkatan desa, serta masyarakat. Masyarakat pun ikut aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat di desa dikarenakan adanya keselarasan visi dan misi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan Desa Pujon Kidul. Dapat dikatakan bahwa terdapat sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melaksanakan program Dana Desa ini.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam pembangunan desa ini, terdapat juga faktor penghambat dalam pengimplementasian program Dana Desa. Faktor penghambat merupakan faktor yang membuat pelaksanaan dari program Dana Desa ini sedikit terhambat dalam hal kelancarannya. Pelaksanaan program Dana Desa ini mempunyai faktor penghambat yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Peneliti sudah melakukan penelitian

di lapangan mengungkapkan ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan program Dana Desa, yaitu: 1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik dalam pelaksanaan program Dana Desa, 2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu. Penjelasan lebih rinci tentang faktor penghambat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa

Dalam pelaksanaan program Dana Desa, pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam merespon jalannya program tersebut. Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik adanya program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam jalannya program Dana Desa. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Penghambat kita itu di sumber daya manusianya. Jadi suatu program itu belum tentu direspon secara baik. Direspon secara baik itu kan memang komunikasi juga, berhubungan dengan *mindset* juga. Jadi masih ada beberapa masyarakat desa yang punya *mindset* kalau ada dana dari atas itu pasti identiknya dengan bagi-bagi. Kadang masyarakat masih curiga juga, ‘kok Dana Desanya enggak kelihatan?’ Mereka berpikarnya masih secara instan. Itu salah satu faktor pengambatnya, *mindset* beberapa masyarakat yang seperti itu.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Pernyataan tersebut juga dilanjutkan oleh pernyataan dari Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat itu *mindset* masyarakat. Masih ada *mindset* masyarakat desa yang mikirnya Dana Desa itu identik dengan bagi-bagi. Lalu juga masih banyak masyarakat desa yang tidak sabaran, curiga kenapa hasil Dana Desanya tidak kelihatan. Padahal pembangunan itu kan tidak bisa instan, karena dananya juga terbatas jadinya pembangunannya harus secara bertahap. Maka dari itu, *mindset* masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat kita.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat dalam menjalankan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul adalah masih adanya masyarakat desa yang belum merespon dengan baik jalannya dari program ini. Masih adanya beberapa masyarakat yang berpikiran bahwa dampak dari Dana Desa belum terlihat dikarenakan tidak adanya pembagian bantuan yang terlihat berupa uang dari Dana Desa tersebut, maupun kurang sabarnya beberapa masyarakat dalam menunggu hasil dari pemanfaatan Dana Desa. Padahal adanya bantuan Dana Desa itu digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, bukannya untuk pembagian bantuan yang terlihat seperti berupa uang kepada masyarakat desa. Proses pembangunan infrastruktur pun tidak bisa langsung

kelihatan secara instan, dikarenakan proses pembangunan itu butuh waktu. Selain itu juga dikarenakan dana yang terbatas, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu.

2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu

Setiap kebijakan atau program pasti selalu di dasari dengan hukum, begitu juga dengan pelaksanaan dari program Dana Desa ini. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa di dasari oleh beberapa dasar hukum yang mengatur bagaimana pemberian hingga penggunaan dari Dana Desa tersebut. Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa Pujon Kidul yang tidak tepat waktu merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan dari Kantor Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambatnya itu terlambatnya regulasi yang datang ke desa kita. Terlambat di sini dalam artian regulasi yang dari Pemerintah Pusat itu sampai ke desa ketika sudah memasuki bulan-bulan yang seharusnya desa kita sudah memberikan laporan perencanaan pembangunan desa ke Bupati. Sebelum mendapatkan Dana Desa itu kan kita harus merumuskan penggunaan Dana Desa untuk satu tahun ke depan, kalau peraturan pelaksanaan mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat terlambat datang ke kita, ya kita juga jadi ikut terlambat bikin perencanaannya. Karna di setiap peraturannya itu diatur harus apa dan gak boleh apa, ya

kalau peraturannya belum turun jadi susah kita.” (Wawancara pada 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Pujon Kidul yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat lainnya ya itu, pedoman pelaksanaan teknis atau regulasi mengenai Dana Desa datangnya terlambat dari atas. Regulasi yang terlambat, perencanaan jadi terlambat juga. Karena datangnya terlambat, kita juga jadinya ikut terlambat juga dalam merumuskan perencanaan penggunaan Dana Desa.” (Wawancara pada 5 April 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul adalah terlambatnya pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang datang ke Desa Pujon Kidul, sehingga menghambat desa dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa. Terlambat yang dimaksud di sini adalah pedoman pelaksanaan (dasar hukum) mengenai Dana Desa yang dari Pemerintah Pusat itu sampai ke desa ketika sudah memasuki bulan-bulan yang di mana Desa Pujon Kidul seharusnya sudah memberikan laporan perencanaan pembangunan desa ke Bupati. Hal tersebut mengakibatkan para *stakeholder* yang ikut serta dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa menjadi terlambat,

serta menghambat Desa Pujon Kidul dalam mencairkan Dana Desa.



C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pujon Kidul

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar, yang kemudian disebut dengan Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu program nasional yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai tahun 2015 hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyatakan bahwa tujuan dari adanya Dana Desa yaitu untuk:

- a. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mendanai pelaksanaan pembangunan;
- c. Mendanai pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Mendanai pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta. Meningkat lagi pada tahun 2017, dana yang dianggarkan untuk Dana Desa ini menjadi Rp 60 triliun, dengan rata-rata penerimaan setiap desa yaitu sebesar Rp 800 juta.

Penggunaan dari Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa penggunaan Dana Desa ini diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Prioritas dari penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa ini dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa ini, desa diharapkan untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses untuk menyejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Hal terpenting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan yaitu menggunakan pola swakelola. Adanya pola swakelola ini, berarti setiap desa diupayakan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, yaitu menggunakan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan desa tidak akan mengalir ke luar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan

tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara itu, penggunaan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat setempat yang memiliki bahan baku tersebut.

Program Dana Desa ini sudah dilaksanakan hampir di seluruh desa yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu Desa Pujon Kidul di daerah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Pujon Kidul merupakan sebuah desa di kawasan Kabupaten Malang yang terkenal akan wisata alamnya, terutama Cafe Sawah. Desa Pujon Kidul ini telah menerima bantuan Dana Desa mulai tahun 2015 hingga tahun 2017. Menurut skala IDM (Indeks Desa Membangun), saat ini Desa Pujon Kidul merupakan desa yang berada dalam kategori Desa Swakarya atau Desa Berkembang, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Anas Taufiq selaku Kepala Urusan Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul.

Implementasi kebijakan publik dijelaskan oleh Tahir (2014:56) sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan yang telah ditetapkan. Kemudian Grindle (dalam Wibawa, 1994:15) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebuah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses pewujudan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pelaksanaan dari program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang ini dapat dianalisis dengan menggunakan model implementasi dari Grindle untuk mengetahui bagaimana suatu program dijalankan dan dampak apa saja yang telah dihasilkan. Dari model implementasi Grindle tersebut, maka program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini akan dianalisis menggunakan dua variabel utama, yaitu: 1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang meliputi; kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan atau program, sumber-sumber daya yang digunakan, dan 2) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) yang meliputi; kekuasaan, strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Berikut adalah penjelasan lebih detail terkait *Content of Policy* dan *Context of Implementation*, yang dipaparkan berikut ini.

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Dasar Hukum yang Digunakan dalam Implementasi Program Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Desa. Program Dana Desa ini merupakan salah satu

wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah menegaskan bahwa pengakuan negara atas desa terhadap kewenangannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa harus diikuti dengan pemberian sumber daya kepada desa agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik. Program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa program Dana Desa ini dibentuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Program Dana Desa ini dijalankan dengan landasan hukum atau dasar hukum yang telah ditetapkan. Program Dana Desa ini dibentuk dengan berlandaskan hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- i) Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa program Dana Desa ini dibentuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. Mengenai dasar hukum dari Dana Desa itu sendiri telah diatur dalam berbagai tingkatan dasar hukum, yaitu: UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri, PMK, Permendes, dan Peraturan Bupati Malang.

2) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa (*Interest Affected*)

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) merupakan salah satu faktor penting yang perlu dikaji lebih dalam lagi guna menunjang efektivitas implementasi kebijakan atau program. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi adalah berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Grindle (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini dapat dilihat dari kegiatan perumusan penggunaan dari Dana Desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam perumusan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul itu

sendiri harus sesuai dengan visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul yang telah ditentukan oleh Kepala Desa Pujon Kidul, yaitu sebagai desa wisata. Segala aspek kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk kemajuan Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata. Dengan semakin majunya Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata, maka kesejahteraan masyarakat desa pun semakin meningkat. Inilah kepentingan utama dalam perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata.

Kepentingan lainnya yang mempengaruhi perumusan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul adalah BUMDes. Agar mencapai visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata, maka penggunaan Dana Desa untuk BUMDes juga perlu diutamakan untuk membantu masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri dalam perekonomiannya, melalui UMKM maupun pengadaan lapangan pekerjaan yang mendukung pergerakan di sektor desa wisata.

3) Manfaat dari Adanya Dana Desa

Manfaat atau tipe manfaat dalam suatu kebijakan merupakan dampak positif yang diperoleh maupun dirasakan, baik dari pihak pelaksana maupun pihak sasaran yang turut terlibat di dalamnya dari adanya kebijakan ataupun suatu program. Grindle (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan pada proses implementasinya harus memiliki manfaat yang positif bagi pembuat kebijakan, implementor, maupun target kebijakan. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki dampak positif atau manfaat yang diberikan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan atau program tersebut tidak berhasil.

Pada pelaksanaan atau implementasi program yang dibentuk, pasti akan memberikan manfaat yang baik untuk penerima program tersebut. Begitu juga dengan adanya program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini juga memberikan manfaat yang baik selama proses implementasinya. Berbagai manfaat telah diperoleh warga Desa Pujon Kidul dari adanya Dana Desa. Penggunaan Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu

prioritas penggunaan untuk pembangunan infrastruktur desa dan prioritas penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

- 8) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:
- 1) Pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) Pengembangan benih lokal;
 - 8) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) Pengelolaan padang gembala;
 - 12) Pengembangan Desa Wisata;

13) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:

- 1) Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain *zircon*, *kaolin*, *zeolite*, *bentonit*, *silika* (pasir kuarsa), *kalsit* (batu kapur/gamping), *felspar*, dan intan.
- 2) Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
- 3) Rumput laut;
- 4) Hutan milik desa;
- 5) Pengelolaan sampah.

Sedangkan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;

- b. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dinyatakan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas yang diatur oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Dari ketentuan-ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa di atas apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka Desa Pujon Kidul dapat dikatakan telah menggunakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan setiap aspek dari prioritas penggunaan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilaksanakan, yang dapat dilihat dari hasil wawancara, RPJMDes, RPK, serta Laporan Penyerapan Dana Desa di Desa Pujon Kidul. Di mulai dari prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Desa Pujon Kidul telah menggunakan Dana Desa untuk pengembangan pos kesehatan desa dan posyandu, serta kegiatan pembangunan untuk gedung PAUD. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana juga telah dilakukan melalui pembangunan jalan (rambat beton), lalu juga pengelolaan air bersih melalui pembangunan tandon air, pembangunan energi melalui pembuatan kicir air, pemeliharaan sanitasi lingkungan, lalu juga dilaksanakannya pembangunan saluran air di desa, hingga

pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa seperti pembangunan dan pengelolaan Cafe Sawah.

Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokalpun juga telah dilaksanakan oleh Desa Pujon Kidul melalui pengembangan BUMDes Sumber Sejahtera dan pengembangan Desa Wisata, sesuai dengan visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul. Selanjutnya penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan melalui pembangunan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah terakhir desa. Kemudian juga penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa telah dilakukan melalui peningkatan kualitas proses perencanaan desa, seperti misalnya dengan mengikutsertakan perempuan atau ibu PKK dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, serta dilaksanakan juga pendukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes maupun masyarakat desa. Kemudian juga diadakannya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, mulai dari ibu PKK, POKDARWIS, hingga masyarakat desa lainnya. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pastilah telah menghasilkan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Pujon Kidul.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini ialah dapat meningkatkan sarana prasarana desa serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Pujon Kidul melalui UMKM dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dana Desa pun digunakan sebagai salah satu alat untuk melaksanakan pembangunan desa. Penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul apabila dilihat dari manfaat yang telah dihasilkan, maka penggunaannya telah sesuai dengan peraturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini juga sesuai dengan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi program menurut Ripley dan Franklin (dalam Akib dan Tarigan, 2008:14) yang menyatakan bahwa sebuah implementasi program dapat dikatakan berhasil salah satunya yaitu apabila pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari program yang ada

tersebut terarah. Dapat dikatakan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul telah sesuai dengan tugas yang disyaratkan, sehingga mendapatkan manfaat atau hasil yang sesuai juga.

4) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa

Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan target atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam suatu kebijakan. Pada poin ini, Grindle (dalam Agustino, 2012) berusaha melihat derajat perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki derajat perubahan yang diinginkan, atau sebuah target yang ingin dicapai bagi sasaran atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan maupun program haruslah mempunyai sasaran atau tujuan yang jelas, begitu juga dengan program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul, bahwa perubahan yang diharapkan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini masyarakat sudah fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapat dari adanya pembangunan desa di Desa Pujon Kidul. Selain itu juga ditambahkan lagi oleh Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul dan Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul yang memiliki harapan bahwa dengan adanya Dana Desa dapat menurunkan angka tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa, melalui UMKM dan penyediaan lapangan pekerjaan yang diadakan oleh unit desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan dari perubahan yang diharapkan oleh para pelaksana program Dana Desa ini ialah masyarakat desa sudah fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapat dari adanya pembangunan desa di Desa Pujon Kidul dan semakin menurunnya angka urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pujon Kidul.

5) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa

Letak pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator dalam *content of policy* yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2012), yang menyatakan bahwa letak pengambilan keputusan berkaitan dengan proses kebijakan publik. Dengan mengetahui proses kebijakan publik, kita dapat memahami setiap proses dalam kebijakan tersebut. Sehubungan dengan proses pengambilan keputusan, William (dalam Winarno, 2007:32) menyatakan bahwa setiap pembuatan kebijakan terdiri dari lima tahap, yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah yang ada pada agenda publik sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah kebijakan tersebut, kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan ‘bermain’ untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkatannya. Kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan menurut William Dunn (dalam Winarno, 2007:32) di atas, setiap pembuatan kebijakan maupun pengambilan suatu keputusan pasti melewati kelima proses atau tahapan tersebut. Namun terdapat satu tahapan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan

atau program, yaitu tahap implementasi kebijakan atau program. Kebijakan yang telah dibuat atau diputuskan ini menjadi dasar dan panutan dalam berjalannya implementasi dalam suatu kebijakan maupun program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan antara Kepala Desa bersama jajarannya dengan perwakilan masyarakat dalam rapat desa. Di mulai dari kegiatan pendataan kebutuhan apa saja yang diinginkan di desa melalui jaring aspirasi, hingga menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam daftar prioritas dan dicatat dalam RPJMDes dan RKP, semua dilakukan melalui musyawarah desa. sehingga dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan antara Kepala Desa beserta jajarannya dengan masyarakat desa dilakukan secara *Bottom-Up*.

6) Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Dalam pengimplementasian sebuah program, pihak-pihak yang terlibat merupakan salah satu faktor yang penting. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Wahab (2012:133) yang menyatakan bahwa implementasi program ditetapkan dengan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara

beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, ataupun organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa
- b) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c) Sekretaris Desa
- d) Kasi Pemerintahan
- e) Kaur Umum dan Perencanaan
- f) Kaur Keuangan / Bendahara
- g) TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)
- h) BUMDes
- i) Karang Taruna
- j) Ibu PKK
- k) Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Pujon Kidul seperti yang telah dijelaskan di atas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa dalam musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan

kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Selain itu dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul, diperlukannya kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat. Adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa akan memperlancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul mempunyai peran yang penting. Keseluruhan pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik itu mulai dari Kepala Desa beserta jajarannya, lembaga di tingkatan desa, hingga BUMDes beserta unit usahanya (contoh: POKDARWIS) dan masyarakat. Masing-masing *stakeholder* sudah bekerjasama dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori implementasi program menurut Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008:12) yaitu adanya

kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

7) Sumber Daya yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Kebijakan yang sukses, berhasil, dan baik tentunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dukungan dari sumber daya tidak tercukupi. Tahir (2014:67) menyatakan bahwa faktor sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika pihak yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Ada bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul, baik untuk pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Sumber daya yang dimanfaatkan yaitu di antaranya sumber daya finansial, sumber daya alam, hingga sumber daya manusia. Mengenai sumber daya finansial, Desa Pujon Kidul pada tahun 2017 telah menerima transfer dari

APBN melalui pemerintah pusat sebesar Rp. 831.968.000 menurut Peraturan Bupati Malang No. 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, Desa Pujon Kidul memaksimalkan warga Desa Pujon Kidul sebagaimana perintah dari Menteri Desa. Hal tersebut dikarenakan agar uang dari Dana Desa sebisa mungkin tidak keluar dari desa dan bisa menyejahterakan masyarakat desa tersebut. Selain itu, SDM Desa Pujon Kidul juga dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

Selain sumber daya manusia, sumber daya alam pun juga dimanfaatkan dalam penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan memanfaatkan kondisi lingkungan alam Desa Pujon Kidul yang sejuk dan alami, maka kondisi tersebut dimanfaatkan Desa Pujon Kidul untuk membangun desa tersebut sebagai desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa di Desa Pujon Kidul telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Hal ini menyebabkan bahwa dengan adanya Dana Desa, baik untuk pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa telah dimanfaatkan untuk membangun dan memajukan Desa Pujon Kidul sebagai Desa Wisata, serta menyejahterakan masyarakat desa.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa

Poin ini menjelaskan bahwa begitu pentingnya kewenangan atau kekuasaan pada sebuah kebijakan sehingga perlu dipertimbangkan, begitu pula dengan kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan maupun program. Grindle (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa apabila suatu kebijakan maupun program dijalankan tanpa adanya perhitungan yang teliti dan matang, maka sangat besar kemungkinan kebijakan maupun program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, strategi yang digunakan Desa Pujon Kidul dalam rangka penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu menggunakan skala prioritas. Skala prioritas dari penggunaan Dana Desa tersebut di antaranya jalan ekonomi, desa wisata, serta yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap arah penggunaan Dana Desa, baik untuk kegiatan pembangunan desa hingga pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul itu sendiri telah ditentukan melalui rapat desa (Musyawarah Desa) yang dilakukan, di mulai dari jaring aspirasi pendapat masyarakat desa hingga penentuan mana sajakah kebutuhan Desa Pujon Kidul yang perlu diutamakan untuk diselesaikan.

Mengenai skala prioritas yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ini juga selalu dipublikasikan kepada masyarakat desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat desa mengetahui seperti apa strategi yang dilakukan Desa Pujon Kidul dalam penggunaan Dana Desa dalam rangka pembangunan desa. Publikasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui pemberitahuan secara formal maupun

non-formal, hingga informasi-informasi yang dipampang di Kantor Desa Pujon Kidul.

2) Tanggapan yang Diberikan oleh Aktor yang Terlibat dalam Program Dana Desa

Kebijakan yang sedang diimplementasikan tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila tidak ada kepatuhan dan respon yang diberikan dari para pelaksana kebijakan tersebut. Pada poin ini, Grindle (dalam Agustino, 2012) ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kebijakan diimplementasikan, maka dapat dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak pada pelaksanaannya, dan nantinya terdapat perubahan yang terjadi atau tidak setelah adanya kebijakan tersebut. Apabila kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan juga menghasilkan perubahan yang positif, maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Keberhasilan ini tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, berbagai tanggapan diberikan oleh pihak atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini. Tanggapan positif diberikan oleh baik Pemerintah Desa maupun

masyarakat desa. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, yang memberi tanggapan bahwa tanggapan yang diberikan oleh masyarakat mengenai Dana Desa sangat baik. Masyarakat ikut aktif dalam melaksanakan program Dana Desa dan sudah merasakan perubahan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini. Perubahan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Desa Pujon Kidul pun sudah dirasakan oleh masyarakat desa sehingga tanggapan yang diberikan oleh masyarakat mengenai adanya Dana Desa sangat positif.

Tanggapan yang positif juga diberikan oleh Mas Fidi selaku pemuda dari Desa Pujon Kidul yang juga merupakan bagian dari POKDARWIS mengenai adanya Dana Desa, bahwa masyarakat desa sangat senang dengan adanya Dana Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa bisa mendapatkan pekerjaan di desanya sendiri, terutama pemuda desa. Adanya Dana Desa yang dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan pelatihan serta pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat desa.

c. Hasil Kebijakan

3) Dampak yang Diterima dari Adanya Dana Desa

c) Dampak Terlihat (*Output*)

Kebijakan yang dibuat akan selalu memberikan perubahan ataupun dampak terhadap sasaran dalam setiap program. Dampak atau perubahan yang diinginkan dari setiap kebijakan merupakan suatu kebijakan ke arah yang lebih baik lagi bagi penerima manfaat dari suatu program. Dampak ataupun perubahan yang bisa dirasakan ialah dampak terlihat dan dampak tidak terlihat. Pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pembangunan desa di Desa Pujon Kidul telah memberikan dampak atau perubahan yang positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul menyatakan bahwa dampak atau perubahan yang diberikan dari adanya Dana Desa ini berdampak positif dan juga baik. Dampak yang terlihat (*output*) dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul adalah adanya saluran air di desa dan perbaikan jalan ekonomi yang telah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul. Selain itu, dampak yang terlihat (*output*) dari adanya Dana Desa juga dikemukakan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul, yang menyatakan bahwa Dana Desa telah

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Pujon Kidul. Salah satu *output* dari adanya Dana Desa yaitu adanya lapangan pekerjaan di desa bagi masyarakat desa itu sendiri. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka pernyataan ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

d) Dampak Tidak Terlihat (*Outcome*)

Selain dari adanya dampak yang terlihat (*output*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program, juga terdapat dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program. Dampak yang tidak terlihat ialah dampak yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerima suatu kebijakan maupun program. Program Dana Desa ini juga memiliki dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dalam pelaksanaannya

di Desa Pujon Kidul. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Bapak Anas Taufiq selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Pujon Kidul menyatakan bahwa *outcome* dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul adalah berkurangnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dikarenakan sudah tersedianya lapangan pekerjaan di desa bagi masyarakat desa. Selanjutnya juga ditambahkan oleh Bapak Prayitno selaku Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul yang menambahkan bahwa *outcome* dari adanya Dana Desa yaitu kini BUMDes menjadi lebih bergairah, tidak hanya sekedar ‘papan nama’ saja. Kini dengan adanya Dana Desa, BUMDes telah menjadi dasar dari peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pujon Kidul melalui UMKM dan pengadaan lapangan pekerjaan dari usaha-usaha desa. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka pernyataan ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4) Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya Dana Desa

Program dapat dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan yang terlihat dari sebelum dan sesudah adanya program berlangsung. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa harus sesuai dengan Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka pernyataan ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul ini memberikan telah memberikan perubahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa dan untuk mencapai cita-cita dari Desa Pujon Kidul itu sendiri sebagai Desa Wisata.

Perubahan yang telah dirasakan dari sebelum dan sesudah adanya Dana Desa ialah kini Desa Pujon Kidul dapat melakukan pembangunan infrastruktur seperti yang sudah direncanakan dalam *masterplan* dari pembangunan Desa Pujon Kidul. Selain itu, kini Desa Pujon Kidul telah menjadi desa wisata yang semakin lebih baik. Dari segi pemberdayaan masyarakat pun ada

perubahan yang telah dirasakan. Kini masyarakat desa, terutama pemuda desa yang selama ini menganggur sudah memiliki pekerjaan di desa. Mereka tergabung dalam POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang bekerja di berbagai bagian dalam Desa Wisata Pujon Kidul. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dirasakan dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul telah dirasakan oleh masyarakat desa, baik di bidang pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, bahwa terdapat dua faktor pendukung, yaitu: 1) Kepala Desa yang visioner, dan 2) Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program Dana Desa. Dengan Kepala Desa yang visioner, maka pembangunan di Desa Pujon Kidul bisa lebih terarah dan terencana dengan baik. Koordinasi antar aktor yang terlibat juga merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah kebijakan. Tahir (2014:129) menjelaskan bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi suatu kebijakan yang dapat dilakukan dengan sosialisasi. Koordinasi yang baik akan tercipta apabila ada komunikasi yang baik antar

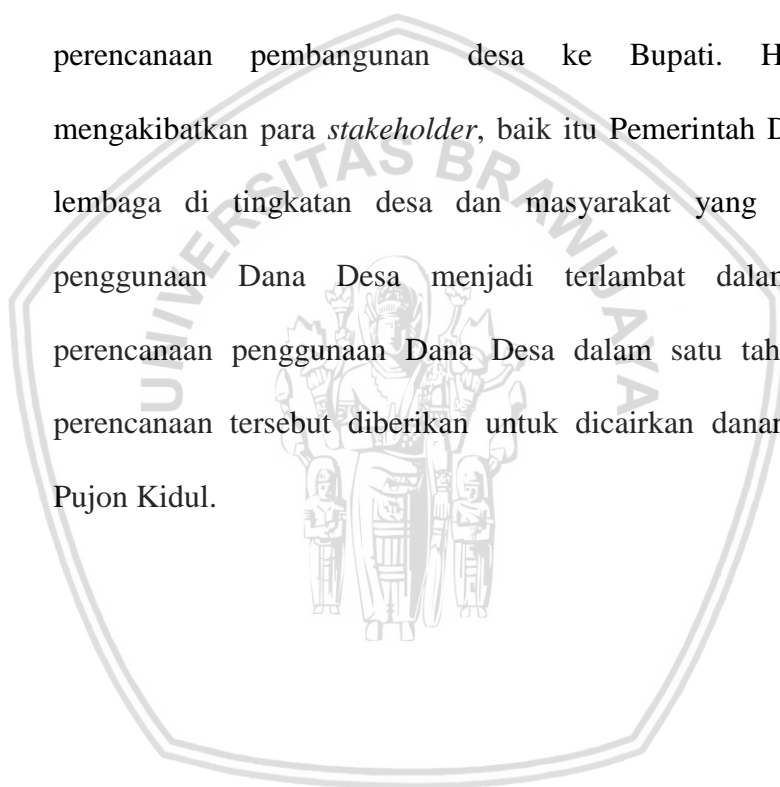
pelaksana. Dalam hal ini adanya sinergi antar pelaksana program Dana Desa bisa terjadi dikarenakan adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan desa, dan dengan masyarakat desa. Adanya keselarasan dalam mencapai visi pembangunan dari Desa Pujon Kidul antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan desa, dengan masyarakat desa mengakibatkan adanya sinergitas di antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam menjalankan program Dana Desa.

b. Faktor Penghambat

Dalam implementasi suatu kebijakan ataupun program, pasti memiliki permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Begitu pula dengan pelaksanaan program Dana Desa di Desa Pujon Kidul. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program Dana Desa, yaitu: 1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa, 2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) penggunaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu.

Masih adanya masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa dikarenakan beberapa masyarakat tersebut belum memahami bagaimana penggunaan dari Dana Desa

itu sendiri. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu. Pedoman pelaksanaan (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat sampai ke desa ketika sudah memasuki bulan-bulan di mana Desa Pujon Kidul seharusnya sudah memberikan laporan perencanaan pembangunan desa ke Bupati. Hal tersebut mengakibatkan para *stakeholder*, baik itu Pemerintah Desa maupun lembaga di tingkatan desa dan masyarakat yang merumuskan penggunaan Dana Desa menjadi terlambat dalam mengatur perencanaan penggunaan Dana Desa dalam satu tahun, sebelum perencanaan tersebut diberikan untuk dicairkan dananya ke Desa Pujon Kidul.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dipaparkan menjadi dua poin, yaitu Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Implementasi Program Dana Desa di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang.

1. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Berdasarkan fokus yang ada, maka terdapat enam komponen pada poin Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang dapat disimpulkan dalam implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul, antara lain:

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam perumusan penggunaan Dana Desa dapat dilihat dari bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul harus sesuai dengan visi dari Desa Pujon Kidul yang telah ditentukan oleh Kepala Desa, yaitu sebagai Desa Wisata, serta BUMDes dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Segala aspek kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan ke sana.
- 2) Manfaat dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik bagi Kepala Desa, BUMDes, hingga masyarakat desa sendiri. Manfaat dari

adanya Dana Desa sudah terasa, baik dari segi infrastruktur desa maupun segi pemberdayaan masyarakat desa.

- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu agar masyarakat dapat fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapatkan dari adanya pembangunan desa yang sedang berjalan, serta semakin menurunnya angka urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa.
- 4) Letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul dilakukan secara musyawarah melalui rapat desa dengan menggunakan pendekatan secara *Bottom-Up*.
- 5) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul secara garis besar antara lain Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan desa, BUMDes dengan unit usaha desa, hingga masyarakat desa.
- 6) Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Sedangkan untuk poin Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) terdiri dari dua komponen yang dapat disimpulkan guna menentukan keberhasilan implementasi suatu program, antara lain:

- 7) Strategi aktor yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu menggunakan skala prioritas.

Skala prioritas dari penggunaan Dana Desa tersebut di antaranya desa wisata, jalan perekonomian, serta yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

- 8) Tanggapan yang diberikan anggota pelaksana penggunaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul merupakan tanggapan yang positif. Masyarakat merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam membangun Desa Pujon Kidul.

Sedangkan untuk poin hasil kebijakan terdiri dari dua poin, yaitu dampak yang diberikan dari berjalannya suatu program, baik itu yang terlihat (*output*) maupun yang tidak terlihat (*outcome*), dan perubahan yang diperoleh anggota pelaksana dari adanya Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

- 9) Dampak terlihat (*output*) dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul di antara adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa, akses ekonomi yang semakin baik, dan adanya lapangan pekerjaan di desa untuk masyarakat Desa Pujon Kidul. Sedangkan untuk dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul di antaranya menurunnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa, meningkatnya kapasitas SDM di Desa Pujon Kidul, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta BUMDes menjadi lebih bergairah.

10) Perubahan yang diperoleh anggota pelaksana dari adanya Dana Desa di Desa Pujon Kidul, dari sebelum dan sesudah adanya Dana Desa ialah kini Desa Pujon Kidul dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang tersusun dalam *masterplan* dan kini telah menjadi desa wisata yang semakin lebih baik. Dari segi pemberdayaan masyarakat pun terjadi perubahan, yaitu kini masyarakat desa, terutama pemuda desa yang selama ini menganggur sudah memiliki pekerjaan di desa.

2. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul

- 1) Faktor pendukung dalam implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu Kepala Desa yang visioner dan adanya sinergi yang baik antar pelaksana program Dana Desa.
- 2) Faktor penghambat dalam implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul yaitu masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa dan pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang muncul selama masa implementasi program Dana Desa di Desa Pujon Kidul, maka peneliti memberikan beberapa alternatif saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan *banner* yang bertuliskan penggunaan Dana Desa Pujon Kidul dalam satu tahun berjalan tersebut di beberapa titik strategis desa, yaitu di setiap dusun disediakan satu *banner*, tidak hanya di Kantor Desa Pujon Kidul saja. Hal tersebut dilakukan agar setiap masyarakat Desa Pujon Kidul dapat mengetahui bagaimana penggunaan dari Dana Desa dengan melihat dari *banner* yang berisikan rincian penggunaan Dana Desa dan masyarakat juga dapat mengawasi terkait penggunaan dari Dana Desa di Desa Pujon Kidul.
2. Terkait mengenai masalah pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu, Pemerintah Pusat perlu mempercepat pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa kepada Pemerintah Desa, sebelum memasuki bulan-bulan di mana desa sudah harus menyerahkan laporan perencanaan pembangunannya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Desa dapat merumuskan penggunaan Dana Desanya dengan tepat waktu dan dapat menerima Dana Desa dengan tepat waktu juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- _____. 2011. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmadi, A., dan Narbuko, C. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik.
- Dwi, Aris. 2017. *Lagi, Desa Pujon Kidul Raih Prestasi Nasional*. Radar Malang, 14 Mei 2017.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Hasan, I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Dana Desa: Problema dan Kontribusi*. Jakarta: Puslitbang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Kajian Pengelolaan Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Jakarta: Puslitbang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Kajian Kebijakan Dana Desa*. Jakarta: Jakarta: Puslitbang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2009. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Rohmah, Kulia Tatik, dan Ma'ruf, M. Farid. 2016. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Kajian Otonomi Daerah*.
- Rozaki, Abdur, dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sadhana, Kridawati. 2012. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra.
- Safkaur, Terianus L. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik: Review Teori*. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 12, No. 1. Papua: Universitas Cendrawasih.
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

_____. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wresniwiro, Surya. 2007. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

